



# **RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK) REVISI 1 BBTKLPP JAKARTA 2020-2024**

Direkotrat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta  
Jl. Bambu Apus Raya No.6 Blok C1, Cipayung, Jakarta Timur 13890  
Telepon (021) 8484912 Faksimilie (021)22106603 [bbtklppjakarta.org](http://bbtklppjakarta.org) [bbtklppjakarta@gmail.com](mailto:bbtklppjakarta@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan.

Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan pertama untuk tahun RPJMN 2020-2024, kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/ kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan di wilayah layanan (Provinsi DKI, Jawa Barat, Banten, Lampung dan Kalimantan Barat) Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya pelaksanaan Surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat. Bagi kepala Bidang dan seksi di bawah Satuan kerja, diharapkan RAK 2020-2024 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Dinamika penganggaran dan terjadinya pandemi COVID19 dipandang perlu melakukan reviu terhadap RAK dan telah dihasilkan RAK Revisi ke 1 BBTCLPP Jakarta 2020-2021

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 ini, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Desember 2021

**Kepala  
BBTKLPP Jakarta**

  
**Naning Nugrahini, SKM, MKM  
NIP. 96611251989032001**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Grafik</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I. Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Kondisi Umum.....	2
C. Potensi dan Permasalahan .....	28
<b>BAB II. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Dan Strategi</b> .....	<b>41</b>
A. Visi dan Misi.....	41
B. Tujuan .....	41
C. Sasaran Strategis.....	41
<b>BAB III. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi</b> .....	<b>43</b>
A. Strategi .....	43
B. Kerangka Regulasi.....	44
<b>BAB IV. Target Kinerja dan kegiatan</b> .....	<b>46</b>
A. Target Kinerja .....	46
B. Kegiatan.....	47
C. Kerangka Pendanaan.....	50
<b>BAB V. Penutup</b> .....	<b>52</b>

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1.	Jumlah Wilayah Layanan BBTCLPP Jakarta Tahun 2020	6
Tabel 1.2.	Jumlah PPNPN Pada BBTCLPP Jakarta menurut Tahun Rekrutmen	11
Tabel 1.3.	Jumlah PPNPN Menurut Jenjang Pendidikan Pada Tahun 2021	
Tabel 1.4.	Kemampuan pemeriksaan laboratorium Penyakit Potensial Wabah	12
Tabel 1.5.	Perhitungan ABK BBTCLPP Jakarta Tahun 2021	14
Tabel 1.6.	Nilai BMN Periode Tahunan Tahun 2021	17
Tabel 1,7	Mutasi Tambah Peralatan Mesin Tahun 2021 dari Pembelian	19
Tabel 1.8	Mutasi Tambah Peralatan Mesin Tahun 2021 dari Transfer Masuk Eselon 1 Ditjen P2P	21
Tabel 1.9	Mutasi Kurang Peralatan Mesin Tahun 2021 karena Hibah Keluar	22
Tabel 1. 10	Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan Tahun 2021	24
Tabel 1. 11	Mutasi Kurang Jalan, Irigasi dan Jembatan Tahun 2021	24
Tabe; 1.12	Usulan Pemindahtanganan BMN Melalui Penjuala	25
Tabel 4.1	Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis RAK BBTCLPP Jakarta Tahun 2020-2024	46
Tabel 4.1	Pendanaan Bersumber APBN Tahun 2020-2024	51

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1. Trens Jumlah Pegawai Negeri Sipil BBTKLPP Jakarta 2017-2021.....	7
Grafik 1.2. Jumlah Pegawai BBTKLPP Jakarta Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2017-2019.....	8
Grafik 1.3. Jumlah Pegawai BBTKLPP Jakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2017-2019 .....	8
Grafik 1.4. Jumlah Pegawai BBTKLPP Jakarta Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2015-2019.....	9
Grafik 1.5. Jumlah Pegawai BBTKLPP Jakarta Berdasarkan Kondisi Mutasi tahun 2017-2019.....	10
Grafik 1.6. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2019 .....	26
Grafik 1.7. Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2017-2019.....	27

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Peta Wilayah Layanan BBTKLPP Jakarta .....	6

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis, yang akan memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan RPJPN. Pada akhir RPJMN periode ini, pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayah dilaksanakan berbagai program salah satunya adalah dukungan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat.

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

Pada periode RPJPN 2020-2024, telah diawali dengan adanya pandemi COVID19, yang secara langsung akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di tingkat global, regional dan juga di Indonesia, termasuk di wilayah layanan BBTKLPP Jakarta yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung dan Kalimantan Barat, dimana dalam pandemi COVID19 ini DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten merupakan wilayah

dengan dampak pandemi meluas, disusul dengan Kalimantan Barat lalu Lampung. Sebagai UPT P2P dengan tugas dan fungsi utama Surveilans Epidemiologi berbasis laboratorium perlu secara cepat dan cermat merumuskan kembali RAK sesuai situasi dan kondisi wilayah layanannya.

## **B. Kondisi Umum**

Capaian indikator kinerja RAK Tahun 2019 yang memuat 9 indikator dimana **terdapat 5 indikator kinerja telah melampaui target**, dengan rincian yaitu: 1) Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan BTKL sebesar 111,11%; 2) Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium sebesar 150,00%; 3) Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi (SHU) sebesar 136,69%; 4) Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik sebesar 110,53%; 5) Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P sebesar 145,45%; dan **4 indikator indikator kinerja mencapai target 100%, dengan rincian yaitu:** 1) Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan; 2) Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung; 3) Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya (Dokumen); 4) Jumlah pengadaan sarana prasarana.

Sedangkan capaian kinerja untuk periode perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam RAK tahun 2015-2019, dari 10 indikator kinerja bisa disimpulkan bahwa BBTCLPP Jakarta telah berhasil mencapai bahkan melampaui target, yaitu dengan rincian 8 indikator berhasil melampaui target dengan capaian tertinggi pada indikator Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P yaitu sebesar 149,13%, dan 2 Indikator mencapai kinerja 100% yaitu pada indikator Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya; dan Jumlah pengadaan sarana prasarana.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan tersebut memberikan dampak positif atas peran BBTCLPP Jakarta terhadap penyelesaian permasalahan faktor risiko penyakit dan kejadian penyakit lintas daerah provinsi di wilayah layanan, seperti (i) keberlanjutan (*maintenance*) eradikasi polio (ERAPO) di DKI Jakarta dan Kota Bandung yang didukung dengan surveilans tentang ada tidaknya virus polio di alam yang berbasis laboratorium, (ii) *maintenance* eliminasi malaria perlu didukung surveilans penyakit dan surveilans vektor malaria lintas daerah di Provinsi Lampung, (iii) pencegahan penyebaran dan penularan flu burung dari unggas ke manusia yang didukung oleh surveilans virus influenza berbasis laboratorium di Jawa Barat dan Banten, dan (iv) penilaian kemajuan

eliminasi filariasis yang didukung oleh hasil pemeriksaan mikrofilaria berbasis laboratorium lintas daerah provinsi, (v) pencegahan penyebaran dan penularan penyakit difteri dengan pemeriksaan rujukan laboratorium di BBTKLPP Jakarta, (vi) pencegahan penyebaran dan penularan penyakit rabies dan PD3I dengan melakukan kalibrasi coldchain lemari penyimpanan vaksin, (vii) pencegahan penyebaran dan penularan penyakit leptospirosis dengan membuat Surveilans Sentinel leptospirosis di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang serta melakukan Surveilans Vektor Leptospirosis, (viii) pencegahan penyebaran dan penularan penyakit terkait Arbovirosis dengan melakukan Sistem Surveilans Sentinel Arbovirosis (Dengue, Chikungunya, dan Zika), dan Sistem Surveilans Sentinel Japanese Encephalitis.

Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terjadi peningkatan kemampuan BBTKLPP Jakarta dalam melakukan pemeriksaan laboratorium dan peningkatan kapasitas SDM mengenai penyakit sehingga semakin bertambah kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh BBTKLPP Jakarta, seperti Monitoring Efikasi Obat Anti Malaria (MEOAM) di Kabupaten Pesawaran, Pre Assessment Malaria di Kabupaten/Kota di wilayah Layanan BBTKLPP Jakarta, Surveilans Sentinel Leptospirosis di Provinsi Banten (Kabupaten Serang dan Kabupaten Banten), Sistem Surveilans Arbovirosis di DKI Jakarta, Surveilans Sentinel Japanese Encephalitis di Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi DKI Jakarta. Selain masuk dalam anggaran BBTKLPP Jakarta.

Pencapaian kinerja kegiatan tersebut didukung dengan capaian kinerja keuangan, pada tahun 2019 yaitu: Realisasi penyerapan anggaran BBTKLPP sebesar Rp 29.642.719.205,00 (95,82%) dari pagu sebesar Rp 30.935.996.000,00. Terdapat efisiensi belanja pada komponen alokasi gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp 194.371.331,00, serta kelebihan alokasi Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar Rp 439.746.217,00, tetapi disisi lain penerimaan PNPB yang tidak optimal yaitu hanya mencapai 53,53% dari total target pendapatan sebesar Rp 920.000.000.

Keberhasilan pencapaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, atas dukungan berbagai pihak yaitu pimpinan unit utama, sinergitas kegiatan dengan unit utama dan organisasi perangkat daerah, komitmen semua pegawai, konsultasi dan bimbingan teknis dari unit utama dan lintas program, optimalisasi penggunaan sumber daya serta monitoring dan evaluasi berkala atas pencapaian kinerja kegiatan.

Dalam hal upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta memperhatikan karakteristik faktor risiko penyakit dan kejadian penyakit yang tidak mengenal batas wilayah administrasi pemerintahan, maka peran UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan khususnya BTKLPP menjadi sangat strategis. Dengan mobilitas barang dan

manusia di jaman globalisasi seperti sekarang ini maka faktor risiko penyakit dan kejadian penyakit (kuman, parasite, bakteri, protozoa, dll) dapat berpindah dari satu Negara ke Negara lain atau dari provinsi yang satu ke provinsi yang lain dengan sangat mudah dan cepat. Keberadaan BTKLPP akan menjadi wakil Kementerian Kesehatan di daerah yang banyak membantu menyelesaikan permasalahan faktor risiko penyakit dan kejadian penyakit lintas wilayah provinsi. Hal ini sejalan dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 13 ayat (2), di mana disebutkan bahwa kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah Urusan Pemerintahan yang lokasi, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara; penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 78 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, BBTCLPP Jakarta mempunyai Tugas dan Fungsi antara lain :

- a. Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi
- b. Pelaksanaan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan
- c. Pelaksanaan Laboratorium Rujukan
- d. Pelaksanaan Pengembangan Model dan Teknologi Tepat Guna
- e. Pelaksanaan Uji Kendali Mutu dan Kalibrasi
- f. Pelaksanaan Penilaian dan Respon Cepat, Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/wabah dan bencana
- g. Pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit tidak menular
- h. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
- i. Pelaksanaan Kajian dan Pengembangan Teknologi Pengendalian Penyakit, Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Matra
- j. Pengelolaan data dan sistem informasi
- k. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- l. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit

Berdasarkan landasan hukum tersebut BBTCLPP Jakarta sebagai UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan dipimpin oleh seorang kepala, mempunyai tugas melaksanakan surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan

model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta kesehatan mata.

Susunan organisasi BBTKLPP Jakarta terdiri dari:

- a. Subbagian administrasi umum;
- b. Instalasi; dan
- c. Kelompok jabatan fungsional

Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan BBTKLPP.

Instalasi yang berkembang di BBTKLPP Jakarta sampai tahun 2020 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor : HK.02.02/1/3130/2019 tanggal 27 Desember 2019 sebanyak 11 instalasi

- 1) Instalasi Laboratorium Faktor Risiko Lingkungan
- 2) Instalasi Laboratorium Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
- 3) Instalasi Laboratorium Intervensi Perubahan Perilaku
- 4) Instalasi Laboratorium Virologi dan Imunologi
- 5) Instalasi Laboratorium Mikrobiologi
- 6) Instalasi Laboratorium Parasitologi
- 7) Instalasi Laboratorium Teknologi Tepat Guna
- 8) Instalasi Laboratorium Uji Resistensi dan Efektifitas
- 9) Instalasi Mutu, Pemeliharaan dan Kalibrasi
- 10) Instalasi Media, Reagensia, Limbah dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 11) Instalasi Pelayanan Publik dan Hubungan Masyarakat

Kelompok jabatan fungsional di BBTKLPP Jakarta terdiri dari :

- 1) Jabatan Fungsional Entomologi Kesehatan;
- 2) Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan;
- 3) Jabatan Fungsional Sanitarian;
- 4) Jabatan Fungsional Epidemiologi Kesehatan.
- 5) Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja
- 6) Jabatan fungsional Perencana
- 7) Jabatan Fungsional Pranata Komputer
- 8) Jabatan Fungsional Arsiparis

BBTKLPP Jakarta melayani 5 (lima) provinsi yang meliputi Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Banten, dan Kalimantan Barat, dengan Jumlah wilayah kabupaten/kota yang dilayani oleh BBTKLPP Jakarta sebanyak 70 kabupaten/kota, dan jumlah penduduk 85.213.375 yaitu :

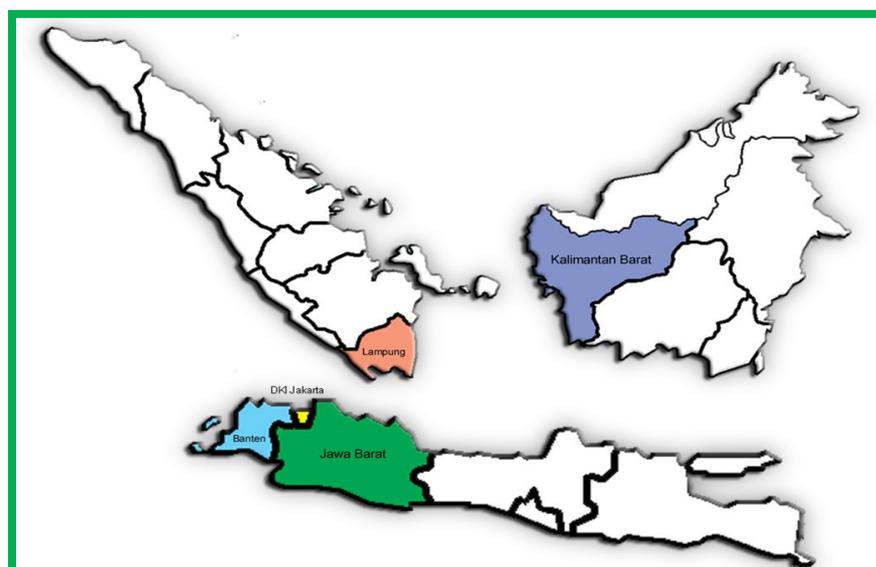
**Tabel 1.1.**  
**Jumlah Wilayah Layanan BBTKLPP Jakarta Tahun 2020**

No.	Wilayah Layanan	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Penduduk
1.	Provinsi DKI Jakarta	5 kota dan 1 kabupaten	10.562.100
2.	Provinsi Jawa Barat	9 kota dan 18 kabupaten	48.274.200
3.	Provinsi Banten	4 kota dan 4 kabupaten	11.904.600
4.	Provinsi Lampung	2 kota dan 13 kabupaten	9.007.800
5.	Provinsi Kalimantan Barat	2 kota dan 12 kabupaten	5.414.400

\*) Data BPS Tahun 2021

Setiap wilayah layanan memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan karakteristik tersebut disebabkan oleh perbedaan sumber daya alam, perbedaan komposisi penduduk, perbedaan geografis, perbedaan infrastruktur, sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Selain itu, keberadaan kegiatan dan/atau usaha di masing-masing daerah juga berbeda seperti antara lain: industri, pertanian, dan pertambangan. Perbedaan tersebut akan turut mempengaruhi status kesehatan masyarakat.

**Gambar 1.1.**  
**Peta Wilayah Layanan BBTKLPP Jakarta**



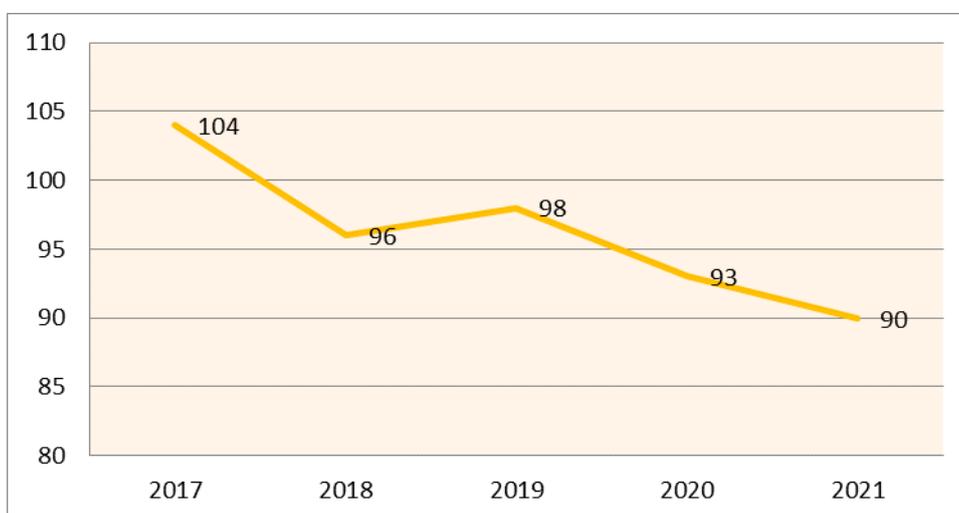
## Sumber Daya Manusia (SDM) BBTKLPP Jakarta

Dilihat dari status kepegawaiannya SDM pada BBTKLPP Jakarta terdiri dari:

### 1. Pegawai Negeri Sipil

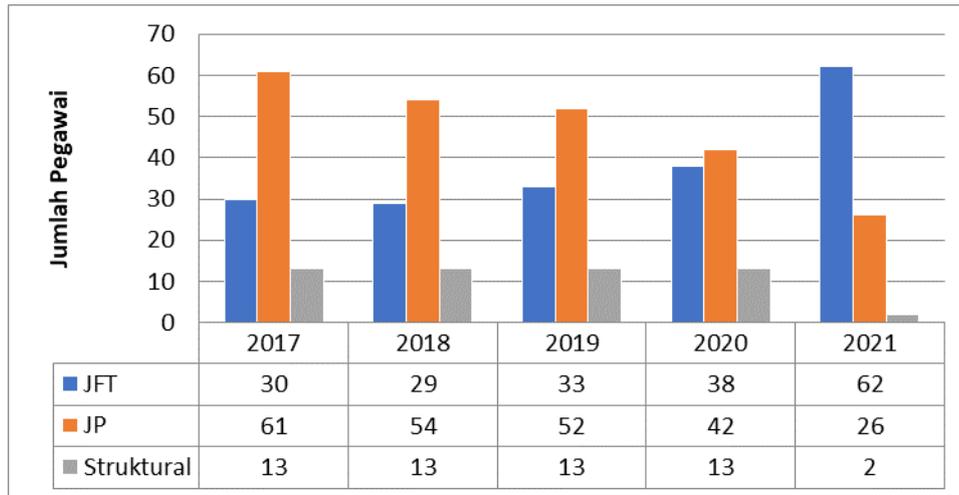
Dilihat dari status kepegawaiannya SDM pada BBTKLPP Jakarta terdiri dari: Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Pegawai Negeri Sipil Pada periode tahun 2017 s.d. 2021 ada kecenderungan penurunan jumlah pegawai pada BBTKLPP Jakarta akibat adanya mutasi pegawai (pindah keluar dan pensiun). Jumlah pegawai terbanyak pada tahun 2017 yaitu sejumlah 104 orang sedangkan jumlah pegawai terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 90 orang.



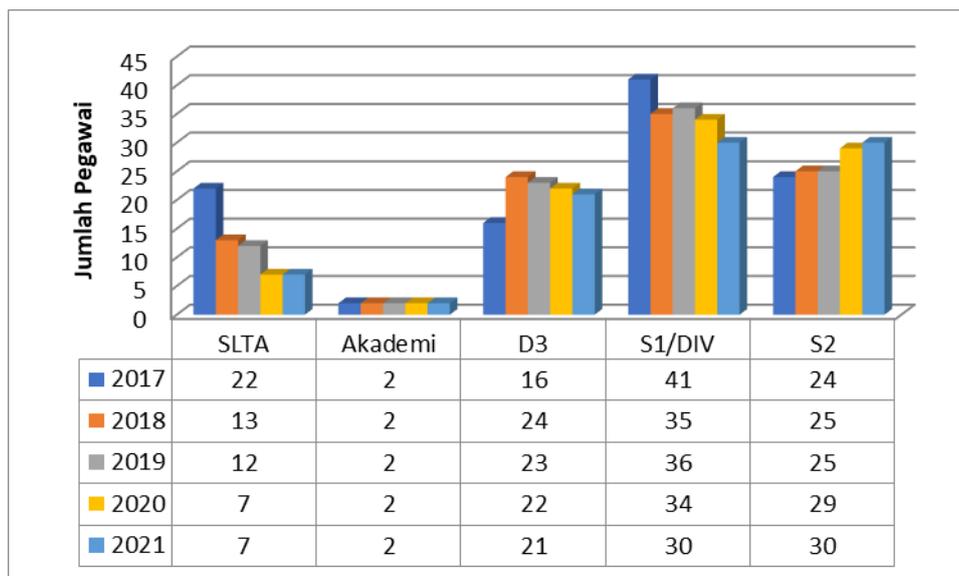
*Grafik 1. 1 Trend Jumlah Pegawai Negeri Sipil BBTKLPP Jakarta  
Tahun 2017-2021*

**Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Jabatan**, sepanjang tahun 2017 s.d 2021 terdapat kecenderungan kenaikan pada Jabatan Fungsional Teknis/JF dan kecenderungan penurunan JFU/Jabatan Pelaksana serta Jabatan Struktural, hal ini sejalan dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mendorong PNS untuk meningkatkan profesionalitas dengan menduduki jabatan fungsional tertentu dan didukung pula dengan program Inpassing Nasional sampai dengan tahun 2021 serta program de-eselonisasi, dimana para pejabat struktural disetarakan menjadi pejabat fungsional teknis.



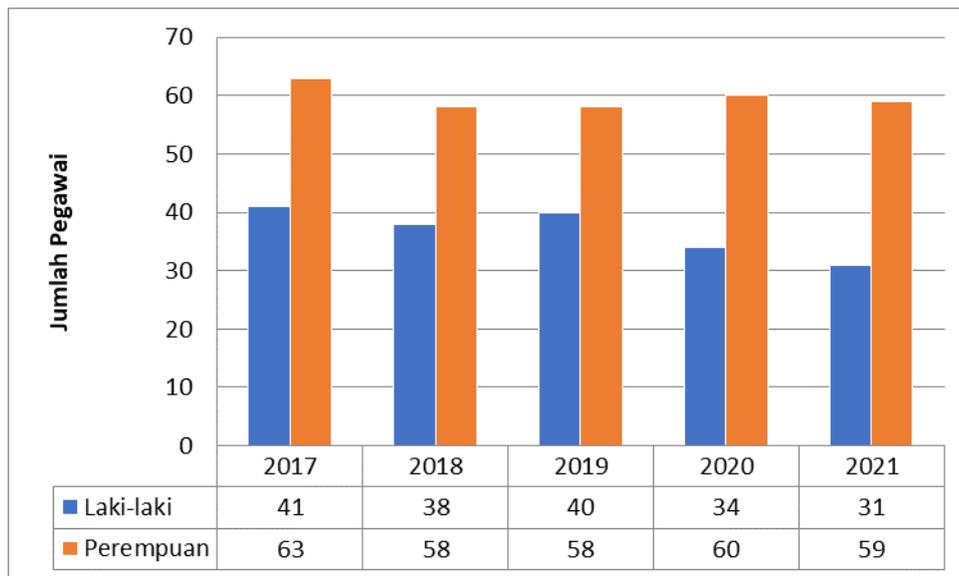
Grafik 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2016-2020

**Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan.** Terdapat pergeseran kondisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2021. Untuk pegawai dengan jenjang pendidikan D3 bertambah 1 orang karena terdapat pegawai yang sudah menyelesaikan izin belajarnya, sedangkan untuk jenjang S1 menjadi berkurang karena terdapat pegawai yang pensiun 1 orang, mutasi keluar sebanyak 1 orang dan 2 orang sedang melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara. Untuk jenjang S2 terdapat penambahan karena terdapat 1 orang pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajar S2nya.



Grafik 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017-2021

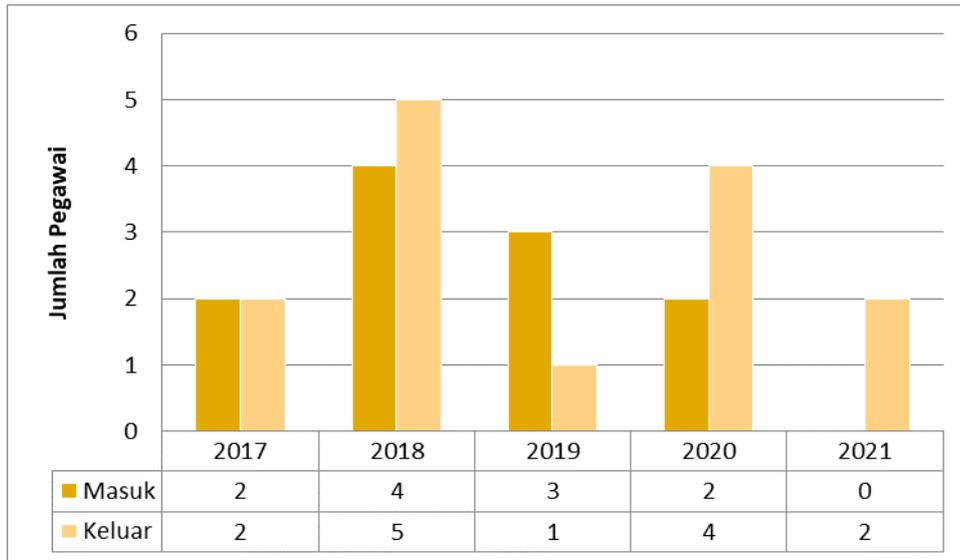
**Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin.** Komposisi pegawai berdasar jenis kelamin di BBTCLPP Jakarta selama 5 tahun mengalami perubahan yang tidak terlalu signifikan, tetap didominasi oleh pegawai berjenis kelamin perempuan. Namun dapat diamati bahwa jumlah pegawai laki-laki cenderung berkurang dalam 3 tahun terakhir, karena ada pegawai yang pensiun dan mutasi keluar.



*Grafik 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2021*

**Pegawai berdasarkan Kondisi Mutasi (Masuk dan Keluar).** Mutasi pegawai terjadi paling banyak pada tahun 2018, hal ini terjadi disebabkan adanya mutasi masuk pegawai pindahan dari satker lain sebanyak 4 orang dan mutasi keluar sebanyak 2 pegawai mendapatkan promosi jabatan dan 3 orang pegawai mutasi keluar dari BBTCLPP Jakarta.

Pada bulan November 2021, telah diterbitkan surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan bahwa proses mutasi yang usulannya belum diterima oleh Biro Kepegawaian sampai dengan bulan Oktober 2021, dilakukan penundaan sementara guna pencegahan dan pengendalian penyebaran serta mengurangi risiko penularan COVID-19 di lingkungan Kementerian Kesehatan. Untuk keadaan mutasi pegawai di BBTCLPP Jakarta, proses mutasi ini telah berlangsung sejak tahun 2020, sehingga 2 orang pegawai tersebut dapat melaksanakan proses mutasi sebelum terbit surat diatas.



Grafik 1,5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kondisi Mutasi Tahun 2017-2021

## 2. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Perekrutan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada BBTCLPP Jakarta diadakan sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan tenaga dalam menunjang pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BBTCLPP Jakarta. Adapun jenis pekerjaan yang diugaskan kepada PPNPN adalah sebagai berikut:

- a. Pramubakti : Jenis pekerjaan teknis, antara lain Pranata Laboratorium Kesehatan, Penyuluh dan Petugas Pelaksana KIE, Pengelola Data, Pelaksana Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Pelaksana K3, Pelaksana Desinfeksi Sekretaris, Administrasi Umum, Pelayanan Publik dan Humas, Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan penelusuran kontak erat, Keuangan & BMN, Pelaporan, Perencanaan kegiatan, dll
- b. Pengemudi : Merangkap sebagai petugas pengirim specimen dilingkungan BBTCLPP Jakarta maupun pengiriman keluar, kurir pengantar surat, desinfeksi, pengatur alur saat PE
- c. Petugas kebersihan : Merangkap sebagai petugas pengelola limbah, desinfeksi.
- d. Petugas Keamanan : merangkap sebagai petugas penerima sampel setelah jam kerja/hari libur

Pada periode tahun 2017 sd 2021 PPNPN yang direkrut pada BBTCLPP Jakarta dapat dilihat pada Tabel berikut.

*Tabel 1. 2 Jumlah PPNPN Pada BBTCLPP Jakarta menurut Tahun Rekrutmen*

Tahun Rekrutmen	Pramubakti	Pengemudi	Petugas Kebersihan	Petugas Keamanan	Total
2017	11	5	6	6	28
2018	11	5	6	6	28
2019	11	5	6	6	28
2020	11	5	6	6	28
2021	11	5	10	12	38

*Tabel 1. 3 Jumlah PPNPN Menurut Jenjang Pendidikan Pada Tahun 2021*

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S1	5
2.	D3	3
3.	D1	1
4.	SLTA	19
5.	SLTP	1

Terdapat penambahan pada jumlah pegawai PPNPN pada tahun 2021, hal ini dapat terlihat pada tabel 1.2 dimana penambahan tenaga tersebut merupakan penambahan tenaga petugas kebersihan dan petugas keamanan. Hal ini dilakukan agar proses kerumahtanggaan dapat berjalan dengan baik.

Sebagai Satuan Kerja dengan tugas pokok dan fungsi Surveilans berbasis laboratorium, Kemampuan laboratorium BBTCLPP Jakarta, sampai dengan tahun 2021 dibagi menjadi:

1. Laboratorium Faktor Risiko Lingkungan
  - a. Laboratorium Penguji telah terakreditasi oleh KAN sesuai SNI ISO/IEC17025:2017, Nomer Serifikat LP-305-IDN dengan ruang lingkup 111 parameter.

Laboratorim Penguji mampu melakukan pemeriksaan specimen lingkungan, khususnya air minum dan air bersih (parameter wajib, parameter tambahan belum semua mampu seperti: pemeriksaan disinfektan, pestisida dan senyawa organik lainnya)

- b. Laboratorium Kalibrasi telah terakreditasi oleh KAN sesuai SNI ISO/IEC17025:2017 Nomer Sertifikat LK-120-IDN dengan ruang lingkup 38 parameter.

## 2. Laboratorium Faktor Risiko Penyakit

- a. Kemampuan pemeriksaan laboratorium Penyakit Potensial Wabah, beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan yaitu :

Tabel 1. 4 Kemampuan pemeriksaan laboratorium Penyakit Potensial Wabah

No	Jenis Penyakit	Kemampuan	Keterangan
1.	Diare Akut	V	Biakan
2.	Malaria confirm	V	Mikroskopis, PCR
3.	Tersangka demam Dengue	V	Trombo, Ieko, Ht
4.	Pneumonia	Legionella	Biakan dan PCR
5.	Diare berdarah (disentri)	V	Biakan
6.	Tersangka Demam Tifoid	V	Serologi
7.	Sindrom Jaundis akut (Hepatitis A,E)	Hepatitis A	PCR
8.	Tersangka Cikungunya	V	RDT, PCR
9.	Tersangka Flu Burung	V	PCR
10.	Tersangka Campak (rubella)	-	
11.	Tersangka Difteri	V	Mikroskopis, kultur, PCR
12.	Tersangka Pertusis	-	
13.	AFP (Lumpuh Layu Mendadak)	-	
14.	Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies	V	PCR
15.	Tersangka Antraks	-	
16.	Tersangka Leptospirosis	V	PCR
17.	Tersangka Kolera	V	Biakan dan Serologi
18.	ILI	V	PCR

- b. Pada tahun 2021, 1 pemeriksaan yaitu COVID-19 terakreditasi 17025 dari KAN

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja BBTKLPP Jakarta, kedudukan sumber daya sangat penting, terlebih kemampuan sumberdaya manusia yang ada sangat menentukan keberhasilan tujuan. Dengan didukung oleh sumberdaya manusia kesehatan yang ada, pencapaian kinerja dapat melebihi target yang telah ditentukan.

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya kinerja selama lima tahun, yaitu :

- 1) Upaya peningkatan kapasitas pegawai yang dilakukan melalui pelatihan-pelatihan teknis dan manajerial yang dilaksanakan setiap tahunnya, antarlain pelatihan untuk penguatan laboratorium, surveilans epidemiologi, penyehatan lingkungan, dan pelatihan manajerial.
- 2) Tingkat pendidikan pegawai yang semakin meningkat dan berkurangnya jumlah pegawai yang berpendidikan Sekolah Menengah.
- 3) Kebijakan Inpassing Nasional yang diluncurkan dengan terbitnya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing dan didukung dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Kesehatan melalui Penyesuaian/Inpassing, kedepannya semakin mendorong ASN untuk menjadi tenaga kesehatan yang profesional dengan menduduki jabatan sebagai tenaga fungsional teknis tertentu.

Dengan SDM yang sangat terbatas (PNS dan PPNP), kinerja BBTKLPP Jakarta dapat dicapai, namun demikian, dalam menghadapi tantangan kedepan dalam pelayanan masyarakat pada wilayah layanan, SDM yang ada tidak cukup kuat untuk dapat memberikan layanan dalam merespons kebutuhan di wilayah layanan, oleh karena itu perlu dilakukan penghitungan ulang kebutuhan SDM pada BBTKLPP Jakarta, dimana pemenuhannya melalui PNS, P3K dan PPNP. Kebutuhan pegawai pada BBTKLPP Jakarta Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

**Tabel 1.5.**  
**Perhitungan ABK BBTCLPP Jakarta Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BEZZETING</b>	<b>ABK</b>	<b>SELISIH +/-</b>
1	Kepala BBTCLPP Jakarta	14	1	1	0
2	Analisis Anggaran Ahli Madya	12	0	1	1
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12	1	1	0
4	Arsiparis Ahli Madya	11	0	1	1
5	Entomolog Kesehatan Ahli Madya	11	0	2	2
6	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	11	2	2	0
7	Perencana Kesehatan Ahli Madya	11	0	1	1
8	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya	11	1	2	1
9	Sanitarian Ahli Madya	11	1	2	1
10	Analisis Anggaran Ahli Muda	10	0	1	1
11	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	0	2	2
12	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	9	1	1	0
13	Arsiparis Ahli Muda	9	0	3	3
14	Entomolog Kesehatan Ahli Muda	9	2	4	2
15	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	9	4	5	1
16	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda	9	2	3	1
17	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	9	0	1	1
18	Perencana Ahli Muda	9	2	2	0
19	Pranata Komputer Ahli Muda	9	0	2	2
20	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	9	13	16	3
21	Sanitarian Ahli Muda	9	4	5	1
22	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	8	3	5	2
23	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	8	0	2	2
24	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	8	7	10	3
25	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	8	0	7	7
26	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	0	1	1
27	Perencana Ahli Pertama	8	0	3	3
28	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	0	2	2
29	Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	0	2	2
30	Entomolog Kesehatan Penyelia	8	0	2	2
31	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	6	13	7

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEZZETING	ABK	SELISIH +/-
32	Sanitarian Penyelia	8	0	2	2
33	Penata Laksana Barang Penyelia	9	0	1	1
34	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	0	2	2
35	Pranata Komputer Penyelia	8	0	1	1
36	Epidemiolog Kesehatan Mahir	7	0	6	6
37	Entomolog Kesehatan Mahir	7	0	3	3
38	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	7	7	14	7
39	Sanitarian Mahir	7	0	3	3
40	Pranata Komputer Mahir	7	0	1	1
41	Epidemiolog Kesehatan Terampil	6	0	4	4
42	Entomolog Kesehatan Terampil	6	1	3	2
43	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	6	3	13	10
44	Sanitarian Terampil	6	0	4	4
45	Pranata Komputer Terampil	6	0	1	1
46	Epidemiolog Kesehatan Ahli	7	0	0	0
47	Entomolog Kesehatan Ahli	7	1	3	2
48	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli	7	2	0	-2
49	Pemeriksa Sanitasi	7	1	3	2
50	Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang	5	0	1	1
51	Pranata Laboratorium Kesehatan	5	5	0	-5
52	Pengelola Penyehatan Lingkungan	5	1	0	-1
53	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM	8	1	1	0
54	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	8	0	1	1
55	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	1	1	0
56	Arsiparis Ahli Pertama	8	0	3	3
57	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	0	2	2
58	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	0	1	1
59	Arsiparis Penyelia	8	0	3	3
60	Analisis Kepegawaian Penyelia	8	0	1	1
61	Analisis Kepegawaian Mahir	7	0	1	1
62	Arsiparis Mahir	7	1	3	2
63	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7	0	1	1
64	Penata Laksana Barang Mahir	8	0	1	1
65	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	1	1	0
66	Penata Laksana Barang Terampil	7	0	2	2

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEZZETING	ABK	SELISIH +/-
67	Pranata Keuangan APBN Terampil	7	0	1	1
68	Analisis Kepegawaian Terampil	6	0	2	2
69	Arsiparis Terampil	6	0	3	3
70	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6	0	1	1
71	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	2	2	0
72	Analisis Barang Milik Negara	7	2	2	0
73	Analisis Keuangan	7	2	2	0
74	Analisis Kepegawaian Ahli	7	2	1	-1
75	Bendahara	7	1	2	1
76	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	7	1	2	1
77	Pengelolaan Keuangan	6	1	1	0
78	Pengelola Barang Milik Negara	6	0	2	2
79	Sekretaris	6	0	1	1
80	Pengelola Instalasi Air dan Listrik	5	3	3	0
81	Pengelola Kepegawaian	5	1	1	0
82	Pengelola Layanan Kehumasan	5	1	1	0
83	Petugas Keamanan	5	0	12	12
84	Pranata Kearsipan	5	2	2	0
85	Pemelihara Sarana dan Prasarana	3	0	1	1
86	Pengemudi	3	0	6	6
87	Pramu Bakti	3	0	6	6

Berdasarkan perhitungan analisa beban kerja yang dilakukan pada Juni 2021, mempertimbangkan kesiapsiagaan KLB/Wabah/bencana/pandemi, dan pemberian layanan secara optimal pada wilayah layanan, maka secara keseluruhan diperlukan sebanyak 247 pegawai.

Sedangkan kondisi saat ini, per Juni 2021, terdapat sebanyak 63 orang PNS fungsional, 30 PNS dengan jabatan pelaksana (1 orang sedang melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara), 2 orang PNS pejabat struktural dan 38 orang PPNPN. Idealnya dibutuhkan tambahan 154 orang pegawai, dengan pemenuhan kebutuhan pegawai melalui jalur PNS, PPPK dan/atau PPNPN.

Atas kesenjangan kebutuhan jumlah pegawai yang diperlukan, BBTCLPP Jakarta mengusulkan penambahan jabatan pelaksana untuk Analisis Anggaran, Perencana, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Penata Laksana Barang, Pranata Komputer, Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang dan Pranata Hubungan Masyarakat.

## Sarana dan Prasarana

### 1. Posisi BMN BBTCLPP Jakarta per 31 Desember 2021

Laporan Posisi Barang Milik Negara pada BBTCLPP Jakarta di Neraca per 31 Desember 2021 setelah mengalami penyusutan regular semester II adalah sebesar Rp. 107.317.276.254. Saldo awal neraca di tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 109.655.269.819 dengan nilai mutasi sebesar Rp. (2.337.993.565).

Tabel 1.6 Nilai BMN Periode Tahunan Tahun 2021

No.	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Tahun 2021		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
<b>I</b>	<b>POSISI BMN DI NERACA</b>	<b>109,655,269,819</b>	<b>(2,337,993,565)</b>	<b>107,317,276,254</b>
<b>A</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>6,365,679,100</b>	<b>10,558,734,152</b>	<b>16,924,413,252</b>
1	Persediaan	6,365,679,100	10,558,734,152	16,924,413,252
<b>B</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>103,205,586,738</b>	<b>(13,191,324,728)</b>	<b>90,014,262,010</b>
1	Tanah	37,940,250,000	-	37,940,250,000
2	Peralatan dan Mesin	63,792,064,257	9,707,558,172	73,499,622,429
3	Gedung dan Bangunan	48,805,237,521	(19,208,563,250)	29,596,674,271
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	992,200,273	(84,490,000)	907,710,273
5	Aset Tetap Lainnya	160,101,000	26,642,000	186,743,000
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(48,484,266,313)	(3,632,471,650.00)	(52,116,737,963.00)
<b>C</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>84,003,981</b>	<b>294,597,011</b>	<b>378,600,992</b>
1	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	-	-	-
2	Aset Tidak Berwujud (Software)	237,750,000	-	237,750,000
3	Akumulasi Penyusutan Software	(225,300,000)	(12,450,000)	(237,750,000)
4	Aset Tidak Berwujud (Software) yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan	157,940,000	(157,940,000)	-

No.	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Tahun 2021		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
5	Akumulasi Penyusutan Software yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan	(157,940,000)	157,940,000	-
6	Aset yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan	4,900,668,747	2,162,432,988	7,063,101,735
7	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(4,829,114,766)	(1,855,385,977)	(6,684,500,743)
<b>II</b>	<b>BMN NON NERACA</b>	<b>518,040,600</b>	<b>(518,040,600)</b>	<b>-</b>
<b>A</b>	<b>EKSTRAKOMPTABEL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	BMN Ekstakomptabel	16,580,100	-	16,580,100
2	Akumulasi Penyusutan Ekstrakomptabel	(16,580,100)	-	(16,580,100)
<b>B</b>	<b>BPYBDS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C</b>	<b>BARANG HILANG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D</b>	<b>BARANG RUSAK BERAT</b>	<b>518,040,600</b>	<b>(518,040,600)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (I+II)</b>		<b>110,173,310,419</b>	<b>(2,856,034,165)</b>	<b>107,317,276,254</b>

a. Aset Lancar/Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 16.924.413.252 (Enam belas milyar Sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah). Mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp. 10.558.734.152 (sepuluh milyar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah).

b. Aset Tetap

1) Tanah

Saldo Tanah yang tercatat dalam neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 37.940.250.000 (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Mutasi tanah sebesar Rp. 0 karena tidak ada penambahan maupun pengurangan nilai tanah.

2) Peralatan Mesin

Saldo peralatan dan mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Satuan Kerja Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit Jakarta per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 1.646 unit dengan nilai sebesar Rp. 73.516.202.529 (tujuh puluh tiga milyar lima ratus enam belas juta dua ratus dua ribu lima ratus dua puluh Sembilan rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1.626 unit dengan nilai sebesar Rp. 63.808.644.357 (enam puluh tiga milyar delapan ratus delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh), mutasi tambah sebanyak 112 unit dengan nilai sebesar Rp. 12.854.168.336 (dua belas milyar delapan ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) dan mutasi kurang sebanyak (92) unit sebesar Rp. (3.146.610.164) (minus tiga milyar seratus empat puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh empat).

Mutasi tambah merupakan penambahan peralatan mesin, baik melalui pengadaan BBTCLPP Jakarta maupun melalui transfer masuk dalam satu kementerian.

**Tabel 1.7. Mutasi Tambah Peralatan Mesin Tahun 2021 dari Pembelian**

No	Kode Barang	Nup	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah	Total Nilai Perolehan
1	3.10.01.02.002	50-53	Lap Top	Hp AMD Ryzen 7	4	52,305,000
2	3.10.01.02.001	16-17	P.C Unit	Lenovo	2	21,560,000
3	3.10.01.02.001	18-21	P.C Unit	CPU Kellva, Monitor Samsung	4	44,000,000
4	3.10.02.03.003	51	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L4160	1	3,559,600
5	3.10.02.03.003	52-53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Hp Laser 107W	2	3,520,000
6	3.03.03.01.034	1	Meter Calibrator	SKC	1	44,055,000
7	3.03.03.10.038	1	Analytical Balance (Neraca Analitik)	KERN ABS 220-4N	1	41,470,000
8	3.05.01.04.002	55	Lemari Kayu		1	5,464,000
9	3.08.01.03.003	5	Mikroskop Dengan Camera	OLYMPUS EP 50	1	50,608,700
10	3.08.01.11.001	5-7	Centrifuge (Alat Laboratorium Umum)	Sorvall Legend Micro 21R	3	255,784,500
11	3.08.01.11.001	8	Centrifuge (Alat Laboratorium Umum)	Hettich Benchtop Centrifuge Universal 320R	1	134,035,000
12	3.08.01.11.002	6	Water Bath (Alat Laboratorium Umum)	Cypress	1	52,840,200

No	Kode Barang	Nup	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah	Total Nilai Perolehan
13	3.08.01.11.003	14	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	CAPP	1	51,357,821
14	3.08.01.11.021	6	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	Autoclave LAC-1031SV	1	125,354,000
15	3.08.01.11.207	2	Gene Amp Pcr System	abCyclerQ Real Time PCR System (96 Sample)	1	944,682,000
16	3.08.01.12.056	2	Microscope Fluoronsence	OLYMPUS CX 43	1	55,039,700
17	3.08.01.12.071	4	Microcentrifuge	Glotech Mini Smartspin Micro Centrifuge	1	12,422,300
18	3.08.01.12.073	11-15	Micro Pippettes	Finnpipette F2 Adjustable 100-1000 Micro Liter	5	17,190,000
19	3.08.01.12.073	16-19	Micro Pippettes	CAPP ECOPIPETE	4	12,986,876
20	3.08.01.12.073	20-21	Micro Pippettes	Eppendorf	2	10,289,696
21	3.08.01.12.073	22-23	Micro Pippettes	Eppendorf	2	10,578,402
22	3.08.01.12.073	24-27	Micro Pippettes	Eppendorf	4	21,065,352
23	3.08.01.13.023	2-3	Deep Freezer (Alat Laboratorium Kimia)	PHCbi	2	166,655,600
24	3.08.01.13.023	4	Deep Freezer (Alat Laboratorium Kimia)	RevcoTM ExF - 86oC	1	156,702,000
25	3.08.01.14.035	1	Magnetic Stirer (Alat Laboratorium Patologi)		1	7,459,787
26	3.08.01.41.126	1-3	Hot Plate Stirer	CAPPRONDO	3	72,929,226
27	3.08.01.41.177	1-2	Multichannel Pippete Dispenser	Capp Aero	2	26,953,932
28	3.08.01.41.177	3	Multichannel Pippete Dispenser	Capp Aero	1	15,290,344
29	3.08.01.41.308	10	Vortex Mixer	GEMMY	1	6,326,000
30	3.08.01.99.999	28	Unit Alat Laboratorium Lainnya		1	27,527,500
31	3.08.03.05.002	9-11	Uninterupted Power Supply (UPS)	UPS 3 Phase Easy 3S 10kVA	3	510,000,000
32	3.08.03.05.002	12-14	Uninterupted Power Supply (UPS)	UPS 3 Phase Easy 3S 20kVA	3	660,000,000
33	3.08.06.05.015	1-2	Biological Microscope	OLYMPUS CX 43	2	113,150,400
34	3.08.06.05.015	3	Biological Microscope	OLYMPUS CX23	1	15,630,100
35	3.08.06.05.033	1	Ultrasonic Cleaner (Alat Laboratorium Penunjang)	Plusonic Ultrasonic Cleaner	1	127,147,800
36	3.08.06.05.036	15-19	Refrigerator/Freezer	PHCbi	5	488,100,000
37	3.08.08.08.002	4	Lux Metter		1	31,102,500

No	Kode Barang	Nup	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah	Total Nilai Perolehan
38	3.02.01.02.003	20	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	New Rush GR Sport	1	244,000,000
39	3.10.01.02.001	22	P.C Unit	Dell Optiplex 7090MT	1	26,250,000
<b>TOTAL</b>					<b>74</b>	<b>4,665,393,336</b>

**Tabel 1.8 . Mutasi Tambah Peralatan Mesin Tahun 2021 dari Transfer Masuk Eselon 1 Ditjen P2P**

No	Kode Barang	Nup	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah	Total Nilai Perolehan	Sumber
1	3.07.01.01.047	1	Centrifuge (Alat Kedokteran Umum)	SPINDOW	1	77,794,458	Mobile Lab P2PML
2	3.08.01.12.073	1-10	Micro Pippettes	Micropipite	10	137,634,400	Mobile Lab P2PML
3	3.08.01.41.308	9	Vortex Mixer	Vortex	1	79,114,458	Mobile Lab P2PML
4	3.08.01.99.999	11-12	Unit Alat Laboratorium Lainnya	Accuhance 8-Channel Pipetter, 20-200	2	14,850,000	Dit SKK
5	3.02.01.05.999	1	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	Mobil laboratorium	1	3,351,972,020	Mobile Lab P2PML
6	3.09.04.08.010	1	Laboratory Type Fuming Cabinet	Biosafety Cabinet (BSC31A20102129)	1	183,064,458	Mobile Lab P2PML
7	3.08.01.41.292	1	Unit Ekstraksi	NX-48S	1	731,909,458	Mobile Lab P2PML
8	3.08.01.99.999	14	Unit Alat Laboratorium Lainnya	RT -PCR COBAS Z480	1	950,864,458	Mobile Lab P2PML
9	3.08.01.99.999	15	Unit Alat Laboratorium Lainnya	Mesin TCM+UPS	1	705,564,458	Mobile Lab P2PML
10	3.08.01.12.001	1	Autocleve	Autoclave (LFSS23AA)	1	155,564,458	Mobile Lab P2PML
11	3.08.01.41.143	1	Laminar Flow	Mini Laf 50 VAD	1	139,064,458	Mobile Lab P2PML
12	3.08.01.53.056	1	Laboratory Fridge/Freezer	DW-25L92	1	151,593,458	Mobile Lab

No	Kode Barang	Nup	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah	Total Nilai Perolehan	Sumber
							P2PML
13	3.08.01.56.999	1	Lainnya (Alat Laboratorium Lainnya)	Thermoblock	1	120,859,458	Mobile Lab P2PML
14	3.08.01.99.999	13	Unit Alat Laboratorium Lainnya	Lexicon II Ultra low Temp.	1	214,500,000	Dit. SKK
15	3.08.01.41.251	1	Stabilizer/UPS	APC SMC30001 2100 watts 3000 VA	1	10,363,636	Dit. SKK JICA
16	3.08.01.99.999	16	Unit Alat Laboratorium Lainnya	Automated Spin Column & Purification System Qiage	1	632,886,364	Dit. SKK JICA
17	3.08.01.99.999	17	Unit Alat Laboratorium Lainnya	Centrifuge	1	55,000,000	Dit. SKK USAID
18	3.08.01.99.999	18-19	Unit Alat Laboratorium Lainnya	Microcentrifuge Refrigerator	2	220,000,000	Dit. SKK USAID
19	3.08.01.99.999	20-21	Unit Alat Laboratorium Lainnya	PCR workstation	2	143,000,000	Dit. SKK USAID
20	3.08.01.99.999	22-23	Unit Alat Laboratorium Lainnya	Vortex Mixer	2	16,500,000	Dit. SKK USAID
21	3.08.01.99.999	24-25	Unit Alat Laboratorium Lainnya	Spin-down	2	15,675,000	Dit. SKK USAID
22	3.08.01.99.999	26-27	Unit Alat Laboratorium Lainnya	Dry bath Digital Heating Cooling Dry bath Thermo S	2	74,250,000	Dit. SKK USAID
23	3.10.01.02.009	1	Tablet PC	Android Samsung Galaxy Tab S6 Lite	1	6,750,000	Dit. SKK JICA
			<b>TOTAL</b>		<b>38</b>	<b>8,188,775,000</b>	

**Tabel 1.9 Mutasi Kurang Peralatan Mesin Tahun 2021 karena Hibah Keluar**

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang (unit)	Nilai Perolehan
1	3.05.02.04.007	1-7	Exhause Fan	2013	7	3,500,000
2	3.05.02.05.011	1	Treng	2005	1	6,000,000

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang (unit)	Nilai Perolehan
			Air/Tandon Air			
3	3.17.01.19.004	1	Jet Pump	2005	1	7,000,000
4	3.05.02.04.004		A.C Split	2004-2015	38	262,328,000
5	3.01.03.02.001	1	Elevator/Lift	2005	1	404,426,176
6	3.06.03.47.002	1	Genset	2013	1	293,000,000
			<b>JUMLAH</b>		<b>47</b>	<b>976,254,176</b>

### 3) Gedung Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2021 per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 29.596.674.271 (Dua puluh Sembilan milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp. 48.805.237.521 (empat puluh delapan milyar delapan ratus lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), mutasi tambah Rp. 1.460.296.750 (Satu milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan mutasi kurang 4 unit dengan nilai Rp. 20.668.860.000 (dua puluh milyar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Mutasi tambah gedung dan bangunan merupakan pengembangan melalui KDP berupa renovasi laboratorium VBPP Termasuk ruang PCR, Instalasi Media Reagensia Limbah dan K3, Instalasi TTG, Pembangunan TPS B3 dan Pembangunan TPS Domestik Tahun 2021.

Mutasi Kurang gedung dan bangunan berupa hibah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu aset eks Kantor BBTCLPP Jakarta yang berlokasi di Jl. Balai Rakyat No.2 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Jakarta Timur.

**Tabel 1.10. Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan Tahun 2021**

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Luas Bangunan	Tahun Perolehan	Jumlah Barang (unit)	Nilai Perolehan
1	4.01.01.01.001	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2400 m2	1997	1	17,535,086,000
1	4.01.01.05.001	1	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	411 m2	2011	1	3,034,703,000
2	4.01.01.14.001	1	Gedung Garasi/Pool Permanen	50 m2	1999	1	91,732,000
3	4.01.01.13.001	1	Gedung Pos Jaga Permanen	4 m2	1997	1	7,339,000
				<b>JUMLAH</b>		<b>4</b>	<b>20,668,860,000</b>

4) Jalan, Irigasi dan Jembatan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2021 per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai sebesar Rp. 907.710.273 (Sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 5 unit dengan nilai sebesar Rp. 992.200.273 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0 ( ), dan mutasi kurang sebanyak (2) unit sebesar Rp. (84.490.000) (minus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu). Mutasi kurang merupakan hibah yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu berupa BMN yang berada di eks Kantor BBTCLPP Jakarta yang berlokasi di Jl. Balai Rakyat No.2 Cakung Timur Jakarta Timur.

**Tabel 1.11 Mutasi Kurang Jalan, Irigasi dan Jembatan Tahun 2021**

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang (unit)	Nilai Perolehan
1	5.03.02.01.001	1	Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil	2011	1	49,000,000
2	5.03.03.03.999	1	Bangunan Penampung Sampah Lainnya	2014	1	35,490,000
			<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>84,490,000</b>

5) Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2021 per 31 Desember 2021 sebanyak 344 unit dengan nilai sebesar Rp. 186.743.000,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 340 unit sebesar Rp. 160.101.000,- (seratus enam puluh juta seratus satu ribu rupiah), mutasi tambah sebanyak 4 unit dengan nilai sebesar Rp. 26.642.000 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit sebesar Rp. (0) ().

6) Konstruksi Dalam Pengadaan (KDP)

Saldo KDP pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2021 per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

7) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (52.116.737.963)

c. Aset Lainnya

1) Kerja sama dengan pihak ke tiga nihil

2) Aset Tidak Berwujud (ATB) di 31 Desember tahun 2021 sebesar Rp. 237,750,000 (Dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

3) Aset yang tidak digunakan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 7.063.101.735 (tujuh milyar enam puluh tiga juta seratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah). Terdapat usulan penjualan BMN yang tengah berproses antara lain :

**Tabel 1.12. Usulan Pemindahtanganan BMN Melalui Penjualan**

	Usulan	Nilai Usulan
	lelang melalui surat no. KN.02.07/1/5961/2021 tanggal 17 November 2021 hal Permohonan Lelang Ulang Barang Milik Negara di BBTKLPP Jakarta. Sedang menunggu penetapan lelang oleh KPKNL Jakarta II.	75.323.348
	penjualan BMN melalui surat No. KN.02.07/1/4605/2021 tanggal 30 September 2021. Terbit persetujuan penjualan dari Ditjen P2P melalui surat Nomor KN.02.07/1/8246/2021 tanggal 15 November 2021 dan akan ditindaklanjuti dengan Surat Permohonan Lelang ke KPKNL Jakarta II.	8,000,600

4) Akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp. (6.684.500.743).

d. BMN Non Neraca

1) Ekstrakomptabel

BMN Ekstrakomptabel per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 16.580.100 (Enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). BMN tersebut tidak mengalami mutase selama tahun 2021.

2) BPYBDS Rp. 0 (nol rupiah).

3) Barang Hilang Rp. 0 (nol rupiah).

4) Barang Rusak Berat

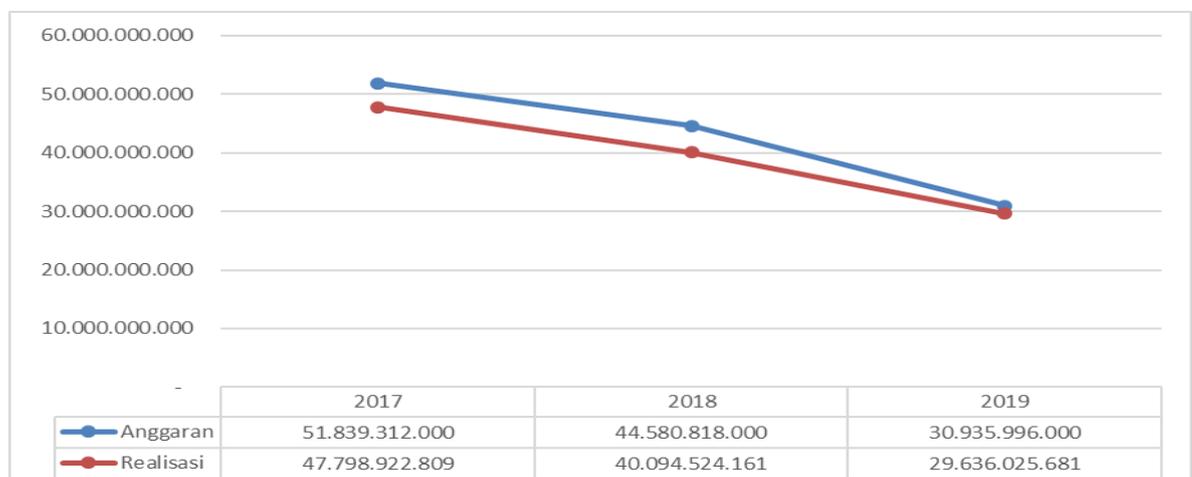
Barang rusak berat per 31 Desember 2021 senilai Rp. 0 (nol rupiah), dengan saldo awal sebesar Rp. 518,040,600 (lima ratus delapan belas juta empat puluh ribu enam ratus rupiah). BMN tersebut telah dilaksanakan lelang di tahun 2021.

### Capaian Kinerja Anggaran

Alokasi anggaran BBTKLPP Jakarta selama periode 2017 sampai dengan tahun 2019 mempunyai trend menurun. Total anggaran tertinggi berada pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 51.839.312.000,00 dan terendah pada tahun 2019 hanya sebesar Rp 30.935.996.000,00. Jika dilihat lebih jauh terlihat bahwa penurunan yang sangat signifikan terjadi pada alokasi anggaran belanja modal, pada tahun 2017 BBTKLPP Jakarta mendapatkan alokasi anggaran belanja modal untuk pembangunan gedung kantor baru dengan alokasi sebesar Rp 29.072.150.000, dan pada tahun 2018-2019 alokasi belanja modal secara signifikan menurun.

Grafik 1.6.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2019



### Alokasi dan Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja

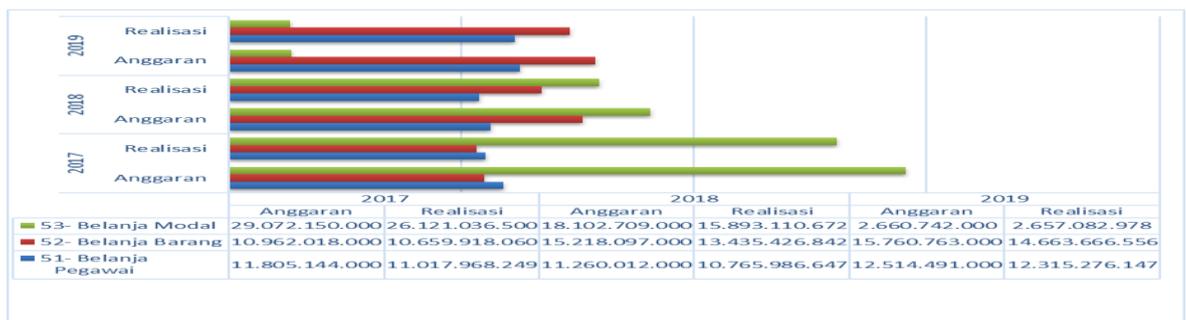
Alokasi anggaran BBTKLPP Jakarta jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2017 sampai tahun 2019 selalu mengalami penurunan. Alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp 30.935.996.000,00 mengalami penurunan sebesar 40,32% jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2017 yang mencapai Rp 51.839.312.000,00. Jika dilihat lebih rinci anggaran pada tahun 2017 yang signifikan besar tersebut dikarenakan BBTKLPP Jakarta melakukan mendapat alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan Gedung Bangunan kantor.

Dari sisi kinerja realisasi anggaran, BBTKLPP Jakarta selama periode tahun 2017-2019 mengalami flutuasi, realisasi anggaran tertinggi pada tahun 2019 dengan capaian sebesar 95,05% (bruto) dari total anggaran Rp 30.935.996.000,00, dan realisasi anggaran terendah pada tahun 2008 yang hanya mencapai 89,94% dari total anggaran Rp 44.580.818.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 5,86% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Penurunan capaian realisasi anggaran pada tahun 2018 disebabkan karena adanya efisiensi penggunaan anggaran pada belanja modal yaitu adanya sisa lelang/kontrak pengadaan alat laboratorium, pengadaan meubeulair laboratorium, pengadaan pembangunan clean room laboratorium (pengadaan Air Handling Unit (AHU) dan instalasi), penyempurnaan pembangunan gedung pelayanan BBTKLPP Jakarta sebesar Rp 2.200.015.501,00, kelebihan alokasi gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp 489.243.053,00, serta kelebihan alokasi Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar Rp 607.760.395,00.

BBTKLPP Jakarta telah mengupayakan peningkatan realisasi anggaran pada tahun 2018 dengan mengajukan revisi anggaran optimalisasi anggaran pada unit utama dalam hal menutupi kekurangan sebagian anggaran untuk pembayaran kenaikan tunjangan kinerja menjadi 80% (rapel tunjangan kinerja mei-desember), namun hanya sebagian kecil anggaran yang diterima yaitu hanya untuk pembayaran selisih pembayaran untuk bulan November dan Desember

**Grafik 1.7.**

### Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2017-2019



### C. Analisis Situasi

**Penyakit berpotensi wabah.** Indonesia merupakan wilayah potensial untuk berbagai macam penyakit didukung oleh iklim tropis, kondisi geografis yang berbeda - beda (pegunungan, pantai, perkotaan) dan perilaku hidup sehat masyarakat yang masih kurang. Penyakit berpotensi wabah (antara lain : TBC, Malaria, DBD, Rabies, Antraks, Pes, Chikungunya, JE, Leptospirosis), Penyakit *Emerging Infectious Diseases* (EID) (antara lain : Flu burung, MERSCoV, Hanta Virus, dan penyakit zoonosa baru lainnya), dan *Neglected Tropical Diseases* (NTD) (antara lain : Filariasis, Schistosomiasis, dan Kecacingan).

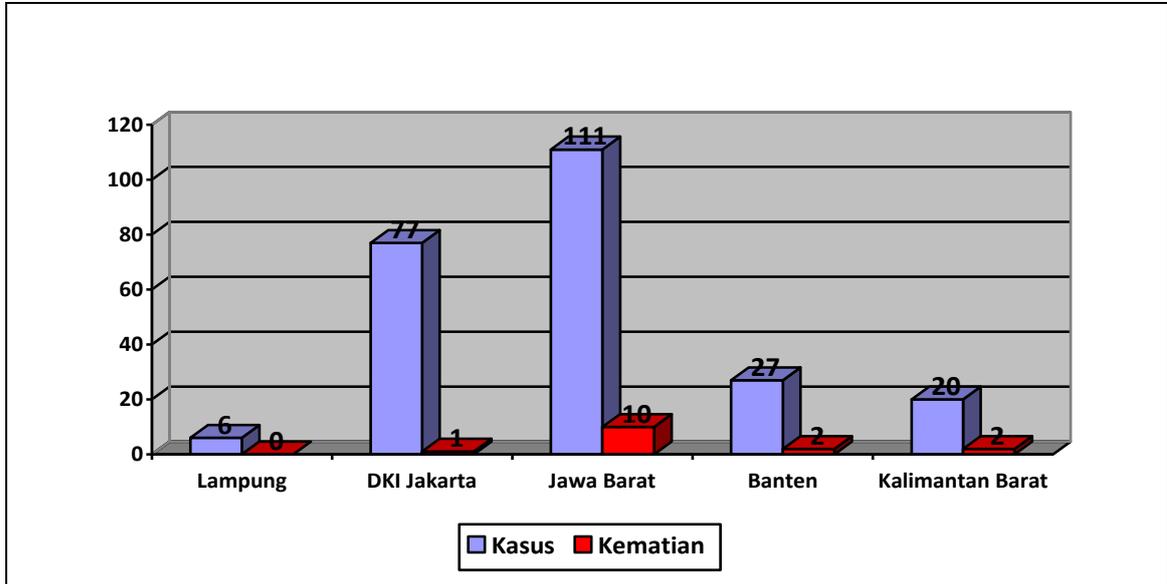
**Tuberkulosis (TBC).** Sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat baik di Indonesia maupun internasional sehingga menjadi salah satu tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs). Indonesia merupakan negara ke -2 tertinggi penderita tuberkulosis.

*Case Detection Rate* (CDR) adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan di antara perkiraan jumlah semua kasus baru tuberkulosis. CDR menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang terjangkau oleh program. CDR TBC di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 64,5% menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya. Provinsi dengan CDR TBC paling tinggi di di wilayah layanan BBTKL PP Jakarta adalah Provinsi Jawa Barat sebesar 96,1% diikuti dengan Provinsi DKI Jakarta 87,5%, Provinsi Banten sebesar 87,2%, Provinsi Kalimantan Barat 54,2%, dan Provinsi Lampung sebesar 54,3%.

Untuk angka keberhasilan Pengobatan TBC sebagian besar provinsi wilayah layanan BBTKLPP Jakarta sudah melewati target WHO  $\geq 85\%$  (Provinsi Lampung sebesar 97,3%, Provinsi Banten sebesar 91,6%, Provinsi Kalimantan Barat sebesar 86,1%, Provinsi DKI Jakarta sebesar 82%).

**Difteri.** Kasus Difteri pada tahun 2019 menyebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Jumlah kasus Difteri pada tahun 2019 sebanyak 529 kasus, jumlah kematian sebanyak 23 kasus, dengan CFR sebesar 4,35%. Kasus Difteri di Provinsi wilayah layanan terdapat pada grafik berikut :

**Grafik 1. 8 Kasus Difteri di Provinsi Wilayah Layanan BBTCLPP Jakarta Tahun 2019**



Dari grafik dapat dilihat bahwa Kasus Difteri tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Barat (111 kasus). Provinsi dengan CFR Difteri tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 10%, Provinsi Jawa Barat sebesar 9,01%, Provinsi Banten 7,41%, Provinsi DKI Jakarta sebesar 1,3% dan Provinsi Lampung sebesar 0%.

Pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik masih menjadi masalah di Indonesia, dan di wilayah layanan BBTCLPP Jakarta, beberapa diantaranya adalah Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD), Leptospirosis, dan Filariasis.

**DBD.** Jumlah kasus DBD yang dilaporkan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 138.127 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 65.602 kasus. Kematian kasus DBD pada tahun 2019 juga menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu dari 467 menjadi 919 kematian. Angka Kesakitan DBD (IR/100.000 penduduk) di Indonesia sebesar 51,48/100.000 penduduk. IR DBD di 3 Provinsi Wilayah Layanan BBTCL PP Jakarta melebihi dari IR DBD Indonesia dengan Provinsi yang terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta (IR DBD : 82,45/100.000 penduduk), Provinsi Lampung (IR DBD : 66,42/100.000 penduduk), Provinsi Kalimantan Barat (IR DBD : 55,20/100.000 penduduk), Provinsi Jawa Barat (IR DBD : 47,62/100.000 penduduk), dan Provinsi Banten (IR DBD : 22,55/100.000 penduduk). CFR DBD paling tinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Barat (0,75%),

Provinsi Banten (0,48%), Provinsi Jawa Barat (0,41%), Provinsi Lampung (0,3%), dan Provinsi DKI Jakarta (0%). Penanganan Kasus DBD paling baik dilaksanakan oleh Provinsi DKI Jakarta sehingga tidak terjadi kematian walaupun jumlah kasus DBD tinggi.

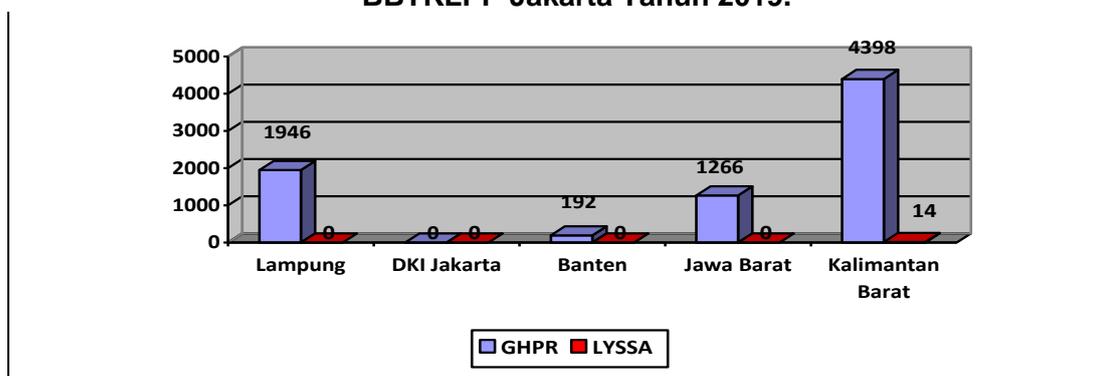
Jumlah Kasus Chikungunya di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 5.042 kasus. Jumlah kasus Chikungunya paling banyak berasal dari Provinsi Jawa barat (1.044 kasus), Provinsi Lampung sebanyak 829 kasus, Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 30 kasus, Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta masing-masing sebanyak 2 kasus. Sampai dengan saat ini belum pernah dilaporkan adanya kematian akibat Chikungunya. Sebagian daerah tidak melaporkan adanya Kasus Chikungunya.

**Malaria.** Target program eliminasi malaria adalah seluruh wilayah di Indonesia bebas malaria pada tahun 2030. Tiga Provinsi yang sudah eliminasi Malaria adalah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bali, dan Provinsi Jawa Timur. Angka kesakitan malaria digambarkan dengan indikator Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk. API di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 0,93/1.000 penduduk.

API di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat sudah mencapai angka 0 pada tahun 2019, sedangkan di Provinsi Lampung sebesar 0,18/1.000 penduduk. Apabila dilihat dari persentase Kabupaten/Kota di Provinsi wilayah layanan dengan API <1 / 1.000 penduduk, maka hanya Provinsi Lampung yang belum mencapai 100% (93,33%), sedangkan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten sudah mencapai 100%

**Rabies.** Pada tahun 2019, kasus Rabies dilaporkan di 27 Provinsi, dan 7 Provinsi berstatus bebas Rabies yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Papua Barat, dan Papua. Kasus GHPR dan Lyssa di Provinsi Wilayah Layanan BBTCLPP Jakarta tahun 2019 sebagai berikut :

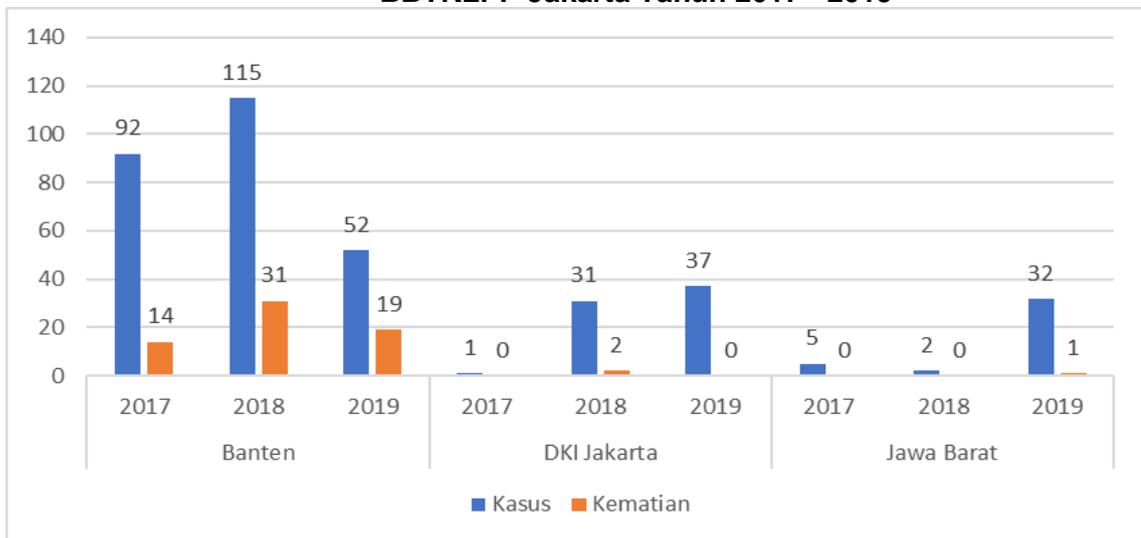
**Grafik 1.9 . Kasus Rabies di Provinsi Wilayah Layanan BBTCLPP Jakarta Tahun 2019.**



Dari grafik dapat dilihat bahwa kasus GHPR (Gigitan Hewan Penular Rabies) tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Barat (4.398 kasus) diikuti dengan Provinsi Lampung (1.946 kasus), Provinsi Jawa Barat (1.266 kasus), dan Provinsi Banten (192 kasus). Untuk LYSSA hanya terdapat di Provinsi Kalimantan Barat (14 kasus).

**Leptospirosis.** Pada tahun 2019 terdapat 9 provinsi yang melaporkan Leptospirosis yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Kasus Leptospirosis tahun sampai 2017 - 2019 terdapat pada grafik berikut :

**Grafik 1.10 . Kasus Leptospirosis di Provinsi Wilayah Layanan BBTCLPP Jakarta Tahun 2017 - 2019**



Grafik menunjukkan bahwa Jumlah Kasus paling banyak berasal dari Provinsi Banten untuk tahun 2017 (92 kasus), tahun 2018 (115 kasus), dan tahun 2019 (52 kasus). CFR paling besar juga berasal dari Provinsi Banten, CFR tahun 2017 sebesar 15,22%, tahun 2018 sebesar 26,96%, dan tahun 2019 sebesar 36,54%.

**Filariasis.** Pada tahun 2019 terdapat 10.758 kasus filariasis yang tersebar di 34 Provinsi. Jumlah kasus kronis Filariasis di Provinsi wilayah layanan BBTCLPP Jakarta terbesar adalah Provinsi Jawa Barat sebanyak 735 kasus, diikuti dengan Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 245 kasus, Provinsi Banten sebanyak 116 kasus, Provinsi Lampung sebanyak 33 kasus dan Provinsi DKI Jakarta sebanyak 23 kasus.

Pelaksanaan Eliminasi Filariasis di Provinsi Wilayah Layanan BBTCLPP Jakarta sebagai berikut :

**Tabel 1. 13. Tahapan Eliminasi Filariasis di Provinsi Wilayah Layanan  
BBTKLPP Jakarta Tahun 2019**

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Kab Endemis	Kab/Kota Selesai POPM	Kab/Kota Melaksanakan POPM	Kab/Kota Tahap PreTAS / TAS / Surveilans Pasca POPM	Kab/Kota tersertifikasi
1	Jawa Barat	27	11	8	3 (Kab. Kuningan, Kab. Purwakarta, Kab. Bogor)	5 (Kab. Tasikmalaya, Kab. Karawang, Kab. Subang, Kab. Bekasi, Kota Bekasi)	3 (Kota Bogor, Kota Depok, Kab Bandung)
2	Banten	8	5	5	0	1 (Kab. Lebak )	4 (Kota Serang, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan)
3	Kalimantan Barat	14	9	1	8 ( Kab. Bengkayang, Kab Sanggau, Kab Kapuas Hulu, Kab Sekadau, Kab Ketapang, Kab. Sambas, Kab. Sintang, Kab. Kubu Raya)	1 (Kab. Melawi, Pre TAS Filariasis th 2019 gagal, POPM kembali selama 2 tahun)	0
4	Lampung	15	1	1	0	1 Kab. Lampung Timur	0

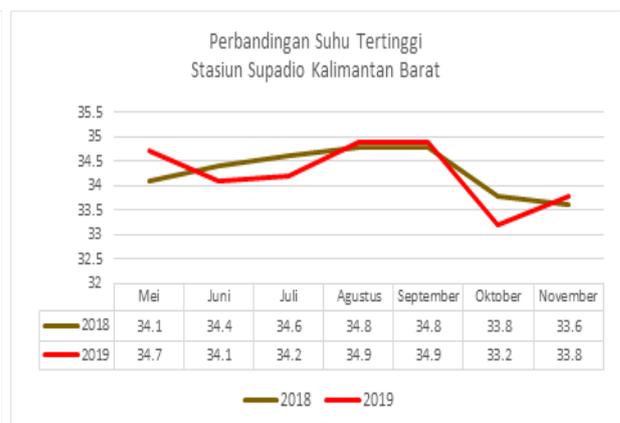
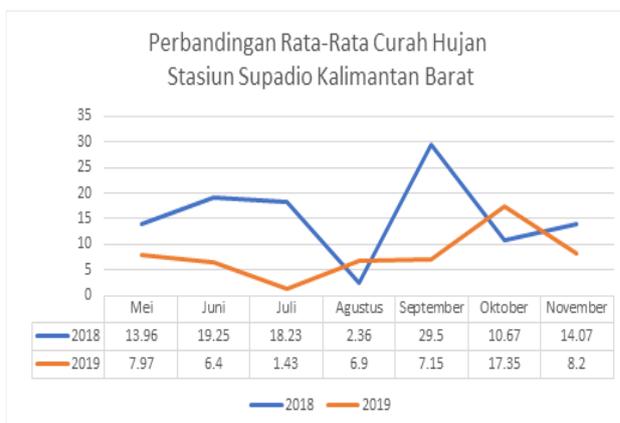
Dari tabel dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kalimantan Barat yang masih memiliki kabupaten/Kota dengan tahapan yang panjang untuk mencapai eliminasi Filariasis.

**Faktor Risiko Lingkungan.** Permasalahan sanitasi lingkungan yang sering terjadi antara lain masalah pencemaran air, pencemaran udara dan kawasan serta pencemaran pangan. Kualitas lingkungan yang tidak memenuhi standar akan memberikan pengaruh terhadap kesehatan apabila tidak segera ditanggulangi. Agen pencemar lingkungan pada umumnya tidak secara langsung terlihat dampaknya terhadap Kesehatan, tidak seperti agen biologi yang langsung tampak dampaknya bagi kesehatan. Pencemaran lingkungan kebanyakan disebabkan oleh agen kimia dan fisik. Dampak kesehatan yang timbul biasanya bersifat akumulatif, dan baru muncul dalam jangka waktu yang cukup lama.

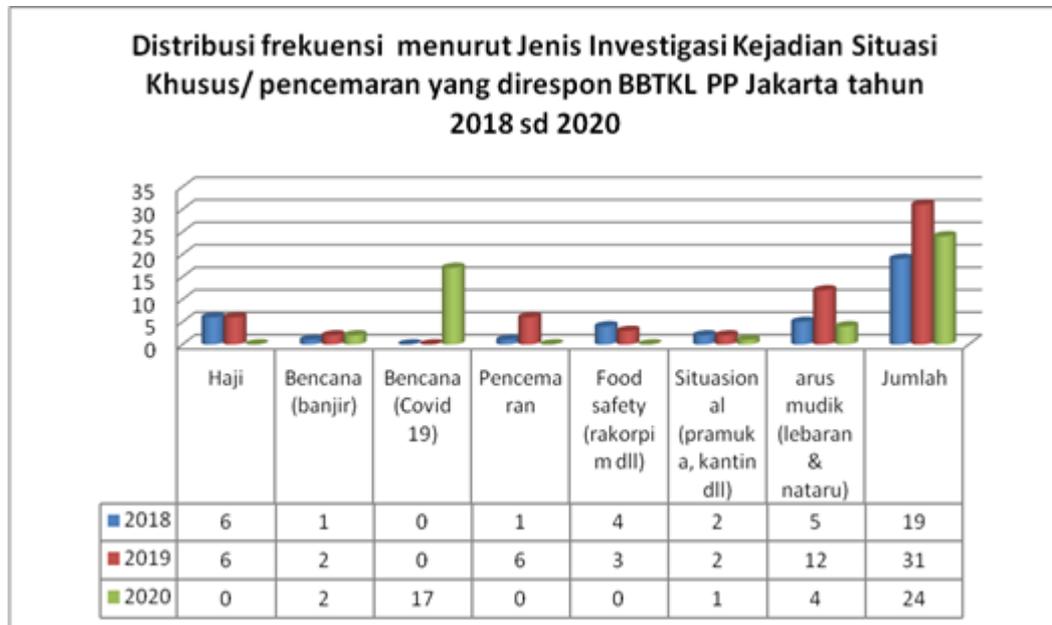
**Kualitas Air di wilayah layanan.** Data mengenai kualitas air di wilayah layanan, di dapat dari Dit Kesling, Ditjen Kesmas Kemenkes. Dari data ini, ditemui bahwa di Jawa Barat terdapat 96% sumber air minum diawasi, sedangkan di Provinsi Banten 96,6% sumber air minum nya diawasi. Untuk itu BBTCLPP Jakarta dapat melaksanakan tugas sebagai pengawas eksternal bagi penyelenggara penyedia air minum.

**Kualitas Udara di wilayah layanan.** Data didapat dari hasil pengamatan data dari stasiun pengukuran udara BMKG di wilayah DKI Jakarta yaitu di DKI1 (Bunderan HI), DKI2 (Kelapa Gading), DKI3 (Jagakarsa), DKI4 (Lubang Buaya), DKI5 (Kebon Jeruk) Jakarta Barat pada tahun 2020. Dari data ini, diketahui bahwa kualitas udara ISPU berkisar antara baik, sedang dan ada beberapa saat kualitas udara tidak baik.

Hasil analisa terhadap data iklim di wilayah Kalimantan Barat yang diwakili stasiun BMKG di Bandara Supadio tahun 2018-2019 dan paparan BMKG tentang perkiraan musim kering di sejumlah wilayah di Indonesia, perkiraan terjadinya musim kering di wilayah Kalimantan Barat terjadi pada bulan Agustus-September. Kejadian yang sering terjadi pada musim kering dengan suhu tinggi adalah kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan polusi kabut asap.



Beberapa respon investigasi pada situasi khusus dan bencana yang dilakukan oleh BBTCLPP Jakarta dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



**Kualitas Pangan Nasional.** Penyediaan pangan yang aman, perlu didukung oleh pengawasan kualitas makanan. Dari data yang diperoleh dari Badan POM laporan kasus keracunan tahun 2019 secara Nasional, ada lima kelompok penyebab keracunan terbanyak. Yang terbanyak adalah binatang (47;34%), diikuti dengan minuman (13;19%), obat (9;92%), makanan (7;63%), dan kimia (7;01%). Dari data tersebut, keracunan yang disebabkan makanan dan minuman masih berada dalam 5 besar penyebab keracunan di Indonesia. Terkait hal tersebut, perlu diperkuat pengawasan dan kajian terkait kesehatan makanan dan minuman.

#### D. Potensi dan Permasalahan

**Cakupan wilayah layanan BBTCLPP Jakarta pada 5 (lima) Provinsi** yaitu Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Banten, dan Kalimantan Barat, pada 5 propinsi tersebut terdapat 70 Kabupaten/Kota, dengan total jumlah penduduk 83.072.853 orang, terdistribusi terutama pada tiga propinsi di pulau Jawa dengan tingkat kepadatan populasi yang sangat tinggi (Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten), serta adanya Propinsi Kalimantan Barat yang merupakan provinsi dengan daerah perbatasan antar negara (Malaysia), yang tentu memiliki pola endemisitas penyakit dan masalah kesehatan yang berbeda dengan propinsi lainnya. Hal yang perlu diantisipasi adalah kemudahan aksesibilitas layanan dan program ke wilayah layanan di mana beberapa di antara wilayah

layanan masih merupakan daerah terpencil dengan keterbatasan jangkauan transportasi, serta kesesuaian proporsi jumlah pegawai BBTCLPP Jakarta dengan jumlah penduduk berisiko yang harus dilayani.

**Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di wilayah layanan**, DKI Jakarta, Banten dan Jabar merupakan wilayah pertumbuhan ekonomi nasional yaitu DKI Jakarta, Banten dan Jabar. Tingkat pembangunan infrastruktur skala nasional seperti pembangunan Bandara (BIJB), Pelabuhan (patimban), dengan didukung pembangunan kawasan industri di wilayah sekitarnya, akan berimplikasi langsung pada kerusakan lingkungan yang memungkinkan menjadi faktor risiko penyakit pada masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu juga akan menarik migrasi/urbanisasi penduduk menuju pusat-pusat ekonomi yang tidak terkontrol termasuk masalah kesehatannya.

**Jumlah daerah tertinggal yang tinggi.** Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah tertinggal Tahun 2015-2019, setidaknya terdapat 12 kabupaten yang termasuk dalam daerah tertinggal. Di antaranya yaitu : 1) Provinsi Lampung ada 2 kabupaten; 2) Provinsi Banten ada 2 Kabupaten; 3) Provinsi Kalimantan Barat ada 8 Kabupaten. Yang memungkinkan juga tingkat derajat kesehatannya rendah sehingga kegiatan harus ditingkatkan pada daerah tersebut.

#### **Secara umum beberapa permasalahan /kelemahan yang ditemui di BBTCLPP**

##### **Jakarta :**

- Keterbatasan SDM baik dari sisi kuantitas dan kualitas untuk mendukung layanan pada masyarakat
- Keterbatasan kapasitas/kemampuan laboratorium dalam melakukan pemeriksaan kejadian penyakit maupun faktor risiko lingkungan seperti Nubika, dan pencemaran
- Keterbatasan peralatan laboratorium dalam mendukung kebutuhan layanan yang beragam
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung mobilitas layanan (kendaraan operasional dan kendaraan operasional lapangan)
- Belum optimalnya dukungan peraturan yang mendukung pelaksanaan kegiatan BBTCLPP Jakarta, untuk mendukung TUSI dengan cakupan regional, contoh dalam PMK tentang Malaria, bahwa peran BTKLPP setara dengan laboratorium tingkat puskesmas
- Pengalokasian anggaran yang belum sepenuhnya berbasis data dan kebutuhan/masalah yang ada di wilayah layanan
- Keterbatasan dukungan anggaran, money follow program belum sepenuhnya terlaksana
- Indikator kinerja belum sepenuhnya ada link dengan indikator kinerja unit utama

- Indikator kinerja yang berubah - rubah
- Ketidak sesuaian pelaksanaan kegiatan dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) oleh karena perlu penyesuaian kembali dengan kegiatan pemangku kepentingan lokasi kegiatan.
- Penetapan rekomendasi terlambat yang menyebabkan penyampaian hasil dan rekomendasi program ke pemangku kepentingan terlambat, sehingga tidak segera di tindak lanjuti daerah terkait.

Tantangan /hambatan yang dialami BBTKLPP Jakarta secara umum antara lain :

- Kondisi geografi dan demografi pada wilayah layanan, meliputi jumlah penduduk, kondisi geografis yang beragam dari mulai metropolitan sampai dengan perkampungan kumuh, daerah industry dan pariwisata, tingkat pendidikan, urbanisasi dan migrasi, kondisi ekonomi.
- Variasi status kesehatan, kejadian penyakit dan faktor risiko kejadian penyakit dan masalah kesehatan masyarakat pada wilayah layanan
- Koordinasi dan harmonissai kegiatan dengan lintas sector dan lintas program, para ahli dan akademisi, termasuk dengan pihak swasta dan masyarakat
- Kecepatan respons terhadap KLB/Wabah, pandemi dan Bencana
- Kurangnya pemahaman mitra terhadap kemampuan, tugas dan fungsi BBTKLPP Jakarta, termasuk bagaimana caranya akses pada layanan BBTKLPP jakarta
- Keterbatasan jenis dan jumlah jabatan fungsional untuk mendukung layanan BBTKLPP Jakarta

Kekuatan dan Peluang antara lain :

- Memiliki kantor tersendiri dengan bangunan yang relative representatif
- Laboratorium telah terakreditasi KAN.
- Memiliki laboratorium untuk pemeriksaan penyakit dan factor risiko penyakit
- Memiliki laboratorium untuk pengembangan teknologi tepat guna
- Sebanyak 137 parameter lingkungan terakreditasi dan memiliki rencana untuk penambahan ruang lingkup dan pengembangan laboratorium
- Memiliki kemampuan pemeriksaan untuk beberapa parameter dan jenis penyakit antara lain COVID19, Diphteri, TBC, Hepatitis A, Typhoid, dll dan memiliki rencana pengembangan
- Memiliki sumberdaya manusia yang relatif masih muda-muda, dengan beragam keahlian
- Memiliki anggaran untuk pelaksanaan kegiatan

- Adanya komitmen dari unit utama untuk mendukung optimalisasi peran, dan peningkatan kapasitas BBTKLPP Jakarta
- Adanya Standardisasi sesuai Keputusan Dirjen P2P No 3130 tahun 2019.

Tantangan lainnya adalah terkait pembangunan kesehatan yang semakin kompleks, di antaranya semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, disparitas status kesehatan antar wilayah, potensi masalah kesehatan akibat bencana dan perubahan iklim, serta sinergitas kegiatan dan program lintas program, sektor di lingkungan pemerintah, antar provinsi dan pusat serta dengan mitra. Kemajuan teknologi, transportasi, dan globalisasi perekonomian membawa keuntungan bagi pembangunan suatu bangsa dengan masuknya modal asing dan terbukanya kesempatan untuk mengeksport komoditas barang dan jasa ke negara lain. Di sisi lain, kemajuan yang ada juga mempengaruhi kompleksitas permasalahan kesehatan karena meningkatkan arus lalu lintas alat angkut, orang, dan barang antar wilayah, antar daerah, bahkan antar negara. Dari sudut pandang kesehatan, hal ini meningkatkan risiko masuk dan keluarnya penyakit menular (*new emerging infectious diseases, emerging infectious diseases* ataupun *re-emerging infectious diseases*), melalui pintu masuk pelabuhan, bandar udara, dan lintas batas darat negara.

Disamping permasalahan dan upaya penyelesaian masalah diatas, pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19, yang tentunya ini secara signifikan akan sangat berpengaruh terhadap status kesehatan, dan juga pola pengembangan program pencegahan dan pengendalian penyakit, dengan adanya pandemic ini maka dokumen – dokumen rencana aksi pencegahan dan pengendalian penyakit perlu dirumuskan kembali.

Sebagai upaya melakukan respons pandemic COVID19, BBTKLPP Jakarta mengembangkan/memberikan layanan COVID19 sebagai berikut :

1. Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit antara lain layanan sosialisasi pada masyarakat dalam rangka edukasi, penyebarluasan informasi dan komunikasi risiko tentang COVID-19; juga melakukan upaya desinfeksi untuk mengurangi paparan masyarakat terhadap virus.
2. Layanan fungsi Surveilans meliputi verifikasi rumor, penyelidikan epidemiologi, dan *contact tracing*, pengambilan swab, dan pengelolaan data/informasi
3. Layanan pemeriksaan laboratorium dengan metode RT-PCR, yang berasal dari fasilitas layanan kesehatan maupun dari hasil penyelidikan epidemiologi dan *contact tracing*

4. Layanan desiminasi informasi hasil pemeriksaan, termasuk pemberian rekomendasi

Sejak April 2020 kegiatan pada BBTKLPP adalah COVID19, sampai dengan tgl 15 Desember 2020, sebanyak 147.700 spesimen telah diterima, 142.712 spesimen telah dilakukan pemeriksaan RTPCR. Penyelidikan Epidemiologi telah dilakukan pada 866 suspek, 22.169 orang yang dilakukan *contact tracing* sebanyak, sedangkan swab yang telah diambil sebanyak 22.127 orang. Sedangkan layanan pengendalian factor risiko, sebanyak 19.061 orang berisiko pada wilayah hotspot telah diberikan sosialisasi untuk edukasi dan komunikasi risiko, sedangkan bangunan yang telah dilakukan desinfeksi seluas 878.543 m<sup>2</sup>, dan estimasi populasi yang dapat dilindungi dari desinfeksi tersebut sebanyak 43.646 orang.

Mengamati pandemi yang terjadi, pelajaran yang dapat diambil oleh BBTKLPP Jakarta, sebagai UPT diwilayah berpenduduk padat, ibukota negara, dan propinsi sekitar ibukota Negara, serta dengan TUSI surveilans berbasis laboratorium maka:

1. Harus mempunyai kemampuan yang mumpuni
2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk kesiap siagaan
3. Harus mampu memberi respons terhadap masalah yang ada diwilayah layanan secara cepat dan tepat
4. Dukungan sumberdaya harus cukup kualitas dan kuantitas
5. Flexibilitas harus tinggi terhadap situasi yang berkembang
6. Mempunyai jejaring dan membangun kemitraan yang luas

Sampai dengan akhir tahun 2021, status pandemi di Indonesia belum berakhir, dalam upaya pengendalian COVID-19 pada tahun 2021 sebanyak 89.801 sampel hasil pemeriksaan PCR telah dikeluarkan dengan hasil positif sebanyak 33.149 (36,9), negative sebanyak 54.007 sampel (60,1%), inkonklusif sebanyak 2.543 sampel (2,8%) dan invalid sebanyak 102 sampel (0,1%). Sejak bulan April 2021 Mobile Lab BBTKLPP Jakarta diperbantukan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong untuk melakukan pemeriksaan PCR Covid-19 kepada para Pekerja Migran Indonesia yang pulang dari Malaysia melalui perbatasan Entikong. Selama periode April-Desember 2021, Mobile Lab BBTKLPP Jakarta telah memeriksa sebanyak 14.165 sampel dengan hasil : 9% Positif (1.296 sampel), 91% Negatif (12.845 sampel), dan 0,2% Invalid (24sampel). Rata-rata Sampel yang diperiksa sebanyak 57 sampel per hari.

Sedangkan dalam kegiatan PE dan *contact tracing*/penelusuran kontak COVID-19 pada tahun 2021 sebanyak 2.532 orang telah diberi layanan PE/penelusuran kontak, sedangkan dalam pengendalian faktor risiko sebanyak 18.515 orang telah diberikan

layanan kendali risiko melalui KIE, desinfeksi dan komunikasi risiko dengan pada perkantoran, konsumen, Pekerja Migran Indonesia (PMI), warga bandara, warga Sekolah dan Terminal. Dengan diberlakukannya Pertemuan Tatap Muka Terbatas (PTMT) di akhir tahun 2021, dalam upaya pengendalian faktor risiko, BBTCLPP Jakarta melakukan Surveilans Faktor Risiko COVID-19 (SFRC-19) pada warga sekolah tingkat SLTA dan sederajat di wilayah Bekasi dan Depok (Jawa Barat).

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/Menkes/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium pemeriksaan Corona Virus Diseases 2019 dimana BBTCLPP Jakarta ditunjuk sebagai Laboratorium Pembina COVID 19 untuk Provinsi Jawa Barat dimana berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat No. 9376/KS.02.04/Labkes tanggal 4 Juni 2021, bahwa BBTCLPP Jakarta ditunjuk sebagai pembina Laboratorium Pemeriksa COVID19 untuk Kabupaten/Kota Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten Karawang. Dengan demikian selama tahun 2021 BBTCLPP Jakarta telah melakukan pendampingan /Pembinaan Mutu Eksternal (PME) untuk 43 Laboratorium pemeriksa COVID-19 di 4 Kab/Kota diatas dan memberikan rekomendasi/masukan untuk ditindaklanjuti oleh Laboratorium pemeriksa tersebut.

Disamping itu, pada tahun 2021 BBTCLPP Jakarta ditunjuk sebagai Laboratorium Penguji Validitas Rapid Diagnostik Test (RDT) Antigen sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/4777/2021, dimana biaya pemeriksaan adalah menjadi tanggung pihak perusahaan yang meminta dilakukannya pengujian, sedangkan tarif PNBP untuk pengujian tersebut belum ada. Sehingga BBTCLPP Jakarta mengajukan usulan tarif PNBP untuk biaya pemeriksaan tersebut, sehingga keluarlah Peraturan Menteri Keuangan RI No. 104/PMK.02/2021, Menteri Keuangan RI menetapkan Jenis dan Tarif PNBP Pelayanan Uji RDT Antigen pada tanggal 2 Agustus 2021. Selama tahun 2021 BBTCLPP Jakarta telah melakukan pengujian validitas RDT Antigen sebanyak 15 Merk RDT antigen yang terdiri 11 merk adalah uji post market atas permintaan dari Direktorat Pengawasan Alkes PKRT Kemenkes RI dan 4 merk adalah uji pre market atas permintaan perusahaan penyedia RDT Antigen.

**Besarnya cakupan wilayah layanan.** Sesuai Permenkes RI No. 78 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit melaksanakan kegiatan yang mendukung program Kementerian Kesehatan melalui pelaksanaan surveilans epidemiologi, analisis dampak kesehatan lingkungan, laboratoroim rujukan, pengembangan model dan teknologi, uji kendali mutu dan kalibrasi, respon cepat dan penanggulangan KLB di wilayah layanan serta kajian dan penapisan teknologi laboratorium, dengan cakupan wilayah layanan sebanyak 5 layanan, yaitu : DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung

dan Kalimantan Barat., BBTCLPP Jakarta melayani 5 (lima) Provinsi yang meliputi Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Banten, dan Kalimantan Barat. Jika dilihat dari luas wilayah yang dilayani oleh BBTCLPP Jakarta, yaitu meliputi 70 Kabupaten/Kota, yang di antara juga merupakan daerah perbatasan negara, dengan jumlah penduduk 85.163.100 orang. Maka hal yang perlu sangat diantisipasi adalah aksesibilitas menuju wilayah layanan di mana beberapa di antara wilayah layanan merupakan daerah terpencil dan tingkat proporsi jumlah pegawai BBTCLPP Jakarta dengan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sejak bulan April 2021 untuk meningkatkan pelayanan, Mobile Laboratorium BBTCLPP diperbantukan untuk memberikan layanan di Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) Entikong untuk memberikan layanan pemeriksaan PCR COVID-19 kepada para Pekerja Migran Indonesia/pelintas batas pada PLBDN Entikong tersebut.

**Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di wilayah layanan.** Setidaknya 3 provinsi yang merupakan wilayah layanan BBTCLPP Jakarta merupakan wilayah pertumbuhan ekonomi nasional yaitu DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Tingkat pembangunan infrastruktur skala nasional seperti pembangunan Bandara (BIJB), Pelabuhan(patimban), dengan didukung pembangunan kawasan industri di wilayah sekitarnya, akan berimplikasi langsung pada kerusakan lingkungan yang memungkinkan menjadi faktor risiko penyakit pada masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu juga akan menarik migrasi penduduk menuju pusat-pusat ekonomi yang tidak terkontrol termasuk masalah kesehatannya.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **A. Visi dan Misi**

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, melalui Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Menurunkan angka *stunting* pada balita, Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

BBTKLPP Jakarta sebagai unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit merupakan salah satu pelaksana atas penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

#### **B. Tujuan**

Guna mencapai tujuan pembangunan kesehatan khususnya dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit, maka Tujuan kegiatan yang dilakukan oleh BBTKLPP Jakarta adalah Meningkatnya Pelayanan Surveilans berbasis Laboratorium, untuk deteksi, pencegahan dan respons penyakit serta factor risiko kejadian penyakit.

#### **C. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis yang akan dicapai adalah Meningkatnya Upaya Deteksi, Pencegahan dan Respons Penyakit diwilayah layanan melalui Peningkatan Pemanfaatan atas Rekomendasi Hasil Surveilans faktor risiko dan kejadian penyakit yang dihasilkan oleh BBTKLPP Jakarta diwilayah layanan yaitu sebesar 80% dari periode sebelumnya.

### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI**

Arah kebijakan dan strategi kegiatan BTKL-PP Jakarta yang dilaksanakan adalah untuk melaksanakan kebijakan dan strategi Ditjen P2P, sesuai TUSI yang diemban oleh BBTKLPP Jakarta, sehingga arah kebijakan pelaksanaan kegiatan BTKLPP Jakarta Sebagai berikut :

1. Penguatan Surveilans Faktor Risiko dan Kejadian Penyakit
2. Penguatan peran dan kemampuan laboratorium kesehatan masyarakat dalam mendukung surveilans faktor risiko dan kejadian penyakit berbasis laboratorium
3. Penguatan respon KLB, Wabah, dan bencana
4. Peningkatan dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Penguatan, Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
6. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung peningkatan layanan
7. Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi.
8. Penguatan Koordinasi, harmonisasi dan Jejaring Kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan
9. Mewujudkan layanan unggulan sebagaimana ditetapkan dalam Perdirjen 3130.

#### **A. Strategi**

Seperti yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, bahwa BBTKLPP Jakarta telah menetapkan tujuan strategis demi tercapainya tujuan nasional program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020 – 2024, serta mengacu pada Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, maka penjabaran strategi aksi kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Surveilans Faktor Risiko dan Kejadian Penyakit diwilayah layanan
2. Peningkatan Peran dan Kemampuan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam mendukung pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit dan surveilans kejadian penyakit diwilayah layanan
3. Peningkatan respons atas KLB, Wabah dan bencana diwilayah layanan
4. Peningkatan layanan pada wilayah – wilayah yang sulit dijangkau, terpencil, lintas batas propinsi dan negara
5. Peningkatan pengembangan dan Pemanfaatan teknologi tepat guna
6. Peningkatan advokasi, komunikasi dan informasi

7. Penguatan akuntabilitas
8. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
9. Pengembangan jejaring dan kemitraan lintas sektor dan program

## **B. Kerangka regulasi**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dibidang kesehatan pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang cepat, bermutu, dan sesuai kebutuhan, termasuk layanan pada BBTKLPP Jakarta. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan, juga Permenkes, Perdirjen, KepMenkes, Kepdirjen yang disusun oleh Kementerian Kesehatan, dan Kementerian lain terkait, juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedure (SOP)/Juknis atau Instruksi Kerja yang dibuat oleh satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan.

Saat ini tersedia regulasi, antara lain :

1. Undang – Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. Undang-Undang 32/2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Minamata Convention On Mercury* (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Zoonosis
7. Peraturan Presiden No 2 tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
9. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Filariasis
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 45/Menkes/SK/VII/2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 tahun 2013 tentang pedoman Tatalaksana Malaria

13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang PENCEPATAN Pergerakan Pencemaran dan kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Sebagai Bencana Nasional
18. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010, tentang persyaratan kualitas air minum
19. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 2349/Menkes/PER/XI/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.
20. Peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
21. Peraturan Menteri Keuangan nomor 150/PMK.06/2014 Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
22. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
23. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alat Angkutan Darat Beromotor Dinas Operasional di Lingkungan Kementerian Kesehatan
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Paparan Merkuri Tahun 2016-2020
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum
27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan

28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya
29. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 581/MENKES/SK/VII/1992 (Lampiran 2) Tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue
30. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1479/ Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular Terpadu
31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
32. Keputusan Menteri Kesehatan No. 239/MENKES/SK/IV/2009 Tanggal 28 April 2009 Tentang Eliminasi Malaria di Indonesia
33. Keputusan Menteri Kesehatan No. 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2015-2019.
34. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 4971 Tahun 2013 tentang Penetapan Zoonosis Prioritas
35. Kep. MenLH tahun 2012, BBTCLPP Jakarta sebagai laboratorium lingkungan rujukan nasional.
36. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES/214/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
37. Keputusan Direktur Jenderal PP dan PL No. HK.02.03/D.1/I.2/99/2015 Tanggal 28 Januari 2015 mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Eliminasi Malaria
38. Kepdirjen No. Hk.02.02/I/3130/2019 tentang Standarisasi Instalasi Teknis, SDM, Sarana, dan Prasarana, serta Penetapan Layanan Unggulan pada Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
39. Sistem Manajemen Laboratorium ISO/SNI 17025:2008
40. Sistem Manajemen Laboratorium Medik ISO/SNI 15189
41. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis BTKLPP Jakarta, beberapa kebutuhan regulasi yang dibutuhkan antara lain regulasi peran dan fungsi laboratorium di BBTCLPP termasuk pengampu teknis dari Pusat, Reviu Standar Operasional Prosedur ditingkat pelaksanaan, Reviu Instruksi Kerja di laboratorium pengujian

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KEGIATAN**

Memperhatikan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan BBTCLPP Jakarta Tahun 2020-2024.

**A. Target Kinerja**

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

**Tabel 4.1.**  
**Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis RAK**  
**BBTKLPP Jakarta Tahun 2020-2024**

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator
	Meningkatnya Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan kejadian penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan sebesar 75%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan sebesar 90 rekomendasi pada tahun 2024</li> <li>2. Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan sebesar 75% pada tahun 2024</li> <li>3. Persentase respon sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam sebesar 95%</li> <li>4. Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan sebanyak 10 unit</li> <li>5. Nilai kinerja anggaran yang dihasilkan sebesar 90%</li> <li>6. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan sebesar 95%</li> <li>7. Kinerja implementasi WBK satker dengan nilai implementasi sebesar 85</li> </ol>

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator
			<p>pada tahun 2024</p> <p>8. Persentase Peningkatan kapasitas SDMK sebanyak 20 JPL sebesar 80% ASN pada tahun 2024</p>

## B. Kegiatan

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Aksi kegiatan 2020-2024.

Sasaran Strategis BTKLPP Jakarta adalah Meningkatnya rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan kejadian penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan sebesar 50% pada tahun 2024, untuk mencapai sasaran strategis tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

### 1. Rekomendasi Kegiatan surveilans faktor risiko penyakit berbasis laboratorium yang disampaikan ke stakeholder terkait di wilayah layanan sebesar 90 rekomendasi pada tahun 2024

Kegiatan yang dilakukan :

- a. Melaksanakan Kegiatan Surveilans/kajian/Studi/Operasional Riset Faktor Risiko Lingkungan atas Kejadian Suatu Penyakit atau Masalah Kesehatan
- b. Melaksanakan Kegiatan Surveilans/kajian/studi/operasional riset Faktor Risiko Perilaku atas Kejadian Suatu Penyakit atau Masalah Kesehatan.
- c. Melaksanakan Surveilans/kajian/studi/operasional riset atas Faktor Risiko Penyakit atas terjadinya Situasi Matra dan Bencana
- d. Melaksanakan surveilans/Kajian/Operasional Riset atas faktor risiko lingkungan Nubika
- e. Desiminasi dan Sosialisasi hasil pelaksanaan kegiatan surveilans faktor risiko penyakit
- f. Memberikan Konsultasi dan Mentoring pada wilayah layanan
- g. Melakukan penyiapan akreditasi, Surveilans dan penambahan ruang lingkup pelaksanaan pengujian laboratorium sebagai laboratorium penguji dan kalibrasi secara periodic (laboratorium lingkungan dan penyakit)
- h. Melakukan pemeriksaan/pengembangan pemeriksaan laboratorium (lingkungan dan penyakit);

- i. Melakukan pemeriksaan laboratorium lingkungan khususnya untuk Nubika
- j. Melakukan pemeriksaan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan penyakit potensial wabah yang dapat menimbulkan KKMD
- k. Pemantapan Mutu Internal dan Eksternal termasuk Uji Mutu
- l. Melaksanakan Kalibrasi (internal dan eksternal);
- m. Menyiapkan jenis media dan reagensia dan pendukung laboratorium;
- n. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kelancaran kegiatan di laboratorium;
- o. Melaksanakan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin;
- p. Melaksanakan jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium.

**2. Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan sebesar 75% pada tahun 2024**

Kegiatan yang dilakukan :

- a. Melaksanakan advokasi atas rekomendasi kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Melaksanakan jejaring kerja dan kemitraan
- c. Mentoring tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi hasil kegiatan.

**3. Persentase respon sinyal KLB/wabah/Bencana kurang dari 24 jam sebesar 95% pada tahun 2024**

Kegiatan yang dilakukan :

- a. Verifikasi rumor atas kejadian penyakit dan masalah kesehatan lainnya
- b. Pembentukan dan penguatan jejaring surveilans epidemiologi dalam rangka respons terhadap sinyal KLB/Wabah/Bencana yang mungkin terjadi
- c. Peningkatan kapasitas dalam rangka pelaksanaan respons sinyal KLB/wabah/Bencana di wilayah layanan
- d. Melaksanakan penyelidikan epidemiologi sebagai respons atas terjadinya KLB/Wabah/Bencana
- e. Melaksanakan rujukan sampel-sampel penyakit yang tidak dapat diperiksa oleh laboratorium BBTCLPP Jakarta ke Laboratorium Rujukan Nasional (Balitbangkes) karena keterbatasan kapasitas SDM dan sarana prasana;

**4. Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan sebanyak 10 unit pada tahun 2024**

Kegiatan yang dilakukan :

- a. Pengembangan model teknologi tepat guna (TTG) yang berorientasi pada pengendalian pencegahan faktor risiko dan kejadian penyakit;

- b. Sosialisasi implementasi TTG di masyarakat
- c. Advokasi penggunaan TTG yang dihasilkan oleh BBTCLPP Jakarta di masyarakat
- d. Melakukan proses patent atas TTG yang dihasilkan.
- e. Melaksanakan jejaring kerja dan kemitraan bidang pengembangan teknologi;

**5. Nilai kinerja anggaran yang dihasilkan sebesar 90% pada tahun 2024**

Kegiatan yang dilakukan :

- a. Meningkatkan kualitas Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
- b. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi/pengukuran kinerja dan pelaksanaan kegiatan secara berkala;
- c. Menyusun laporan baik kegiatan teknis dan administrasi yang transparan dan akuntabel;
- d. Melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik.

**6. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan sebesar 95% pada tahun 2024**

Kegiatan yang dilakukan :

- a. Menyusun laporan dan administrasi keuangan yang baik, transparan dan akuntabel;
- b. Pengelolaan keuangan dan BMN yang sesuai dengan peraturan.

**7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 80% pada tahun 2024**

Kegiatan yang dilakukan :

- a. Peningkatan kapasitas ASN dibidang pengelolaan kegiatan dalam rangka tatakelola pemerintahan yang baik(perencanaan, kepegawaian, keuangan, monitoring & evaluasi, pelayanan public/pelayanan prima, keamanan kantor, kebersihan, jaringan, humas dan yanlik, dll)
- b. Peningkatan kapasitas ASN dibidang pengembangan Teknologi Laboratorium, Kalibrasi & perawatan, Teknologi Tepat Guna, dll
- c. Peningkatan kapasitas ASN dibidang surveilans epidemiologi;
- d. Peningkatan kapasitas ASN di bidang pengendalian factor risiko lingkungan dan perilaku;

### **C. Kerangka Pendanaan**

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

**Tabel 4.2.**  
**Pendanaan Bersumber APBN**  
**Tahun 2020-2024**

No	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					ALokasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	50	46	77	80	90	11.653.727.000	46.685.615.000	69.537.949.000	76.491.743.900	84.140.918.290
2	Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	25	50	75	75	75	560.831.000	128.884.000	251.290.000	276.419.000	304.060.900
3	Persentase respon sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam	90	95	95	95	95	336.518.000	967.766.000	773.878.000	851.265.800	936.392.380
4	Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	2	2	2	2	2	218.600.000	164.090.000	322.499.000	354.748.900	390.223.790
5	Nilai kinerja anggaran	80	83	85	85	90	119.065.000	435.998.000	832.035.000	915.238.500	1.006.762.350
6	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80					19.652.388.000	-	-	-	-
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		80	93	93	95	-	20.680.320.000	24.194.710.000	26.614.181.000	29.275.599.100
7	Kinerja implementasi WBK satker	70	75	75	80	85	-	7.183.000	8.266.000	9.092.600	10.001.860
8	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	30	60	80	80	80	-	388.088.000	509.335.000	560.268.500	616.295.350
<b>Jumlah</b>							<b>32.541.129.000</b>	<b>69.457.944.000</b>	<b>96.429.962.000</b>	<b>106.072.958.200</b>	<b>116.680.254.020</b>

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BTKLPP Jakarta Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya BTKLPP Jakarta dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Bidang/ seksi di BTKLPP Jakarta mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua Substansi di BTKLPP Jakarta oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BTKLPP Jakarta, upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

**PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN**

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab	
				5	6
1	Meningkatnya rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	1	Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	Koordinator Substansi SE, ADKL dan PTL	Sub koordinator sub substansi Advokasi KLB, Pengkajian & Diseminasi Lingkungan Fisik & Kimia, Lingkungan Biologi, Teknologi PP, Teknologi Laboratorium
		2	Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	Koordinator Substansi SE, ADKL dan PTL	Sub koordinator sub substansi Advokasi KLB, Pengkajian & Diseminasi Lingkungan Fisik & Kimia, Lingkungan Biologi, Teknologi PP, Teknologi Laboratorium
		3	Persentase respon sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam	Koordinator Substansi SE dan ADKL	Sub koordinator sub substansi Advokasi KLB, Lingkungan Fisik & Kimia
		4	Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	Koordinator ADKL	Sub Koordinator sub substansi Lingkungan Fisik dan Kimia
		5	Nilai kinerja anggaran	Koordinator TU	Sub Koordinator Sub Substansi Program dan laporan
		6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Kasubag Adum	Kasubag Adum
		7	Kinerja implementasi WBK satker	Kasubag Adum	Kasubag Adum
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Kasubag Adum	Kasubag Adum

**MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN  
TAHUN 2020 – 2024**

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL (DO)	CARA PERHITUNGAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	Surveilans, kajian atau rekomendasi faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko penyakit, kajian/survei penyakit dan faktor risiko kesehatan, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP	Jumlah surveilans, kajian, rekomendasi survei faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko kesehatan, kajian/Survei penyakit dan faktor risiko kesehatan, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP selama 1(satu) tahun	50	46	77	80	90
2	Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	Rekomendasi hasil kegiatan surveilans atau kajian/Survei faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko penyakit, kajian/survei penyakit dan faktor risiko penyakit, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh B/BTKLPP dan stakeholder terkait dalam periode 3 tahun terakhir	$(A/B)*100\%$ A= Jumlah rekomendasi hasil kegiatan surveilans atau kajian/survei faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko kesehatan, kajian/Survei penyakit dan faktor risiko kesehatan, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP yang <b><u>dilaksanakan/ditindaklanjuti</u></b> oleh B/BTKLPP dan stakeholder terkait sampai dengan 3 tahun sejak rekomendasi dikeluarkan	25	50	75	75	75
			B= Jumlah rekomendasi hasil kegiatan surveilans atau kajian/survei faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium baik surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko kesehatan, kajian/Survei penyakit dan faktor risiko kesehatan, pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium oleh B/BTKLPP yang <b><u>disampaikan</u></b> kepada stakeholder terkait selama 3 (tiga) tahun terakhir					
3	Persentase respon sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam	Respon sinyal Kewaspadaan dini (SKD) Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana yang diterima oleh B/BTKLPP di wilayah layanannya < dari 24 jam dalam 1 (satu) tahun. Respons berupa komunikasi, rencana PE/Investigasi, lap penerimaan spesimen	$(A/B)*100\%$ A = Jumlah Sinyal SKD KLB/Bencana yang direspon oleh B/BTKLPP < 24 jam dalam 1 (satu) tahun	90	95	95	95	95
			B = Jumlah Sinyal SKD KLB/Bencana yang diterima oleh B/BTKLPP dalam 1 (satu) tahun					

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL (DO)	CARA PERHITUNGAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
4	Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	yaitu kegiatan Penyiapan, rancang bangun, Uji Coba Skala Lab, Uji Coba skala Lapangan untuk TTG baru, pada tahun yang sama juga melakukan Sosialisasi pada masyarakat untuk jenis TTG yang dihasilkan tahun sebelumnya.	Jumlah teknologi tepat guna (TTG) baru yang dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun	2	2	2	2	2
5	Nilai kinerja anggaran	Capaian Keluaran Kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik	realisasi volume kegiatan / target volume kegiatan x realisasi indikator kegiatan / target indikator kegiatan	80	83	85	85	90
6	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	Kepatuhan satker dalam menyampaikan laporan keuangan dengan parameter jumlah dan ketepatan waktu upload dan rekonsiliasi	Penilaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan di hitung berdasarkan jumlah total skor pada tiap parameter yang di nilai dibagi dengan jumlah parameternya dikalikan dengan persentase maksimal 100%	80				
6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi	Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan menggunakan Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM-SPAN) yang dapat dipantau setiap bulan. Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran mengacu pada empat aspek pengukuran dengan 13 indikator		80	93	93	95
7	Kinerja implementasi WBK satker	Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (self Assesment) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.	Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil	70	75	75	80	85
8	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan kompetensinya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	<b>(A/B) * 100%</b>	30	60	80	80	80
			A = Jumlah ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas selama 1 (satu) tahun					
			B= Jumlah ASN pada Satuan Kerja selama 1 (satu) tahun					